

INFORMATION ONLY



**PEDOMAN**

**ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE  
(ESG)**

*ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE (ESG) GUIDELINES*



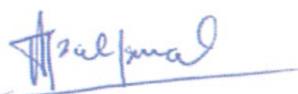
## KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN

Sejalan dengan Visi dan Misi PT Bukit Asam Tbk serta dalam rangka menjaga keberlanjutan bisnis Perusahaan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan melalui pengembangan praktik keberlanjutan di seluruh bisnis, PT Bukit Asam Tbk berkomitmen untuk:

1. Mengurangi emisi gas rumah kaca dan limbah serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi air dan energi dalam rangka mengatasi masalah perubahan iklim melalui pengelolaan risiko fisik yang berkaitan dengan potensi bencana alam dan risiko transisi terkait peraturan, reputasi, dan/atau pasar serta mengintegrasikannya dalam strategi dan operasi yang didukung kolaborasi dengan *stakeholder* terkait.
2. Melindungi dan melestarikan lingkungan, air, sumber daya alam, serta energi melalui Sistem Manajemen Lingkungan berbasis risiko yang dipantau secara berkala dan bertanggung jawab.
3. Mengelola dan memitigasi risiko dan dampak terhadap keanekaragaman hayati dengan menerapkan hierarki mitigasi yang bertujuan untuk mencapai *No Net Loss Ambition* dan *Net Positive Impact* serta ketahanan ekosistem.
4. Menerapkan standar tinggi terkait Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan bagi pekerja yang berada di wilayah operasional Perusahaan serta mempersiapkan dan menangani keadaan darurat.
5. Berkontribusi terhadap *Sustainable Development Goals* dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar Perusahaan didukung dengan konsultasi dan pelibatan para pemangku kepentingan dan masyarakat lokal.
6. Menghormati hak-hak masyarakat komunitas adat dimana Perusahaan beroperasi termasuk mempromosikan pembangunan sosial ekonomi, mendukung terpenuhinya hak-hak sosial ekonomi dan budaya, serta melindungi situs budaya dengan tidak membuka tambang di situs warisan budaya dan kawasan konservasi, yang berlaku untuk seluruh aset perusahaan.
7. Mempromosikan penyampaian produk dan layanan berkelanjutan kepada pelanggan.
8. Mendukung penetapan prinsip *green procurement* serta penggunaan tenaga kerja dan kontraktor lokal sepanjang sesuai dengan kebutuhan operasional Perusahaan.
9. Mendorong keberagaman dan inklusi sebagai prinsip dasar dalam praktik tata kelola, mencakup mendorong representasi dewan direksi yang mencerminkan keberagaman serta mengadopsi praktik inklusif yang memungkinkan seluruh dewan direksi berpartisipasi dan berkontribusi secara penuh dan bermaksa tanpa memandang latar belakang.
10. Mengembangkan pegawai secara berkelanjutan, perlakuan yang adil, keragaman di tempat kerja, dan mendukung kebijakan *respectful workplace*.
11. Memastikan kepatuhan terhadap seluruh persyaratan hukum dan menjunjung tinggi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di seluruh aktivitas Perusahaan.
12. Melaporkan dan memantau isu-isu kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola secara berkala sebagai upaya untuk mempertahankan transparansi dan akuntabilitas serta menciptakan kesadaran terhadap ESG (*Environmental, Social, Governance*).

Kebijakan ini wajib dikomunikasikan, didokumentasikan, serta ditinjau secara berkala dan menjadi tanggung jawab bersama setiap orang yang bekerja atas nama PT Bukit Asam Tbk untuk memastikan penerapan kebijakan ini sesuai dengan sasaran dan upaya perbaikan secara berkelanjutan.

Tanjung Enim, 14 Desember 2024



Arsal Ismail  
Direktur Utama



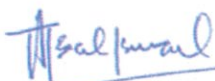
## SUSTAINABILITY POLICY

*In line with the Vision and Mission of PT Bukit Asam Tbk, as well as to maintain the sustainability of the Company's business and create long-term value for stakeholders through the development of sustainable practices throughout the business, PT Bukit Asam Tbk committed to:*

- 1. Reducing greenhouse gas emissions and waste as well as improving water and energy effectivity & efficiency, to overcome the problem of climate change by managing physical risks related to potential natural disasters and transition risks related to regulations, reputation, and/ or market and integrating them into strategy and operations supported by collaboration with relevant stakeholders.*
- 2. Protecting and preserving the environment, water, natural resources, and energy through a risk-based environmental management system that is regularly monitored and responsibly managed.*
- 3. Managing and mitigating risks and impacts on biodiversity by implementing a mitigation hierarchy aimed at achieving No Net Loss Ambition, Net Positive Impact, and ecosystem resilience..*
- 4. Implementing high standards regarding Health, Safety, and Environment for workers in operational areas of the Company and preparing for and addressing emergencies effectively.*
- 5. Contributing to Sustainable Development Goals to improve the economic and social welfare of society around the company, supported by consultation and engagement with stakeholders and local communities.*
- 6. Respecting the rights of the indigenous communities in the areas where the Company operates, including promoting socio-economic development, supporting the fulfillment of social, economic, and cultural rights, and protecting cultural heritage sites by committing not to open mines in World Heritage Sites and conservation areas, applicable to all Company asset.*
- 7. Promoting sustainable delivery of products and services to customers.*
- 8. Supporting the implementation of green procurement principles and the use of local labor and contractors, as long as it is in accordance with the company's operational needs.*
- 9. Promoting diversity and inclusion as fundamental principles in governance practices, including encouraging board representation that reflects diversity and adopting inclusive practices that enable all board members to participate and contribute fully and meaningfully, regardless of their background.*
- 10. Continuously developing employees, ensuring fair treatment, workplace diversity, and supporting a respectful workplace policy.*
- 11. Ensuring compliance with all legal requirements and upholding the principles of Good Corporate Governance across all Company activities.*
- 12. Regularly reporting and monitoring environmental, social, and governance (ESG) performance issues to maintain transparency and accountability, while raising awareness about ESG initiatives.*

*This policy must be communicated, documented, and reviewed periodically. It is everyone's shared responsibility, people working on behalf of PT Bukit Asam Tbk, to ensure implementation.*

*Tanjung Enim, December 14<sup>th</sup> 2024*



**Aرسال Ismail**  
President Director





## KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA DAN MASYARAKAT ADAT

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) berkomitmen untuk menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) serta kepentingan, budaya, adat istiadat serta nilai-nilai pegawai dan pemangku kepentingan dengan mengacu pada :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang
- Peraturan Presiden RI No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2021 No. 35)
- Perjanjian Kerja Bersama Periode 2023-2025 antara PTBA dengan Serikat Pegawai (SPBA)
- Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PTBA No. 07/SK/PTBA-DEKOM/2021 dan No. 408A/01000/2021 Tentang Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis PTBA (*Code of Conduct*)
- Prinsip-Prinsip *The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPR), *The United Nations Global Compact* (UNGC), *The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP), dan *The United Nations Development Programme* (UNDP) *Social and Environmental Standards* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
- *The Voluntary Principles on Security and Human Rights* (VPSHR)
- *The International Council on Mining and Metals (ICMM) Indigenous Peoples and Mining Position Statement*
- Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) / *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) oleh *World Wildlife Fund* (WWF)
- *The International Council on Mining and Metals (ICMM) Indigenous Peoples and Mining Position Statement*
- Prinsip-prinsip Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja berdasarkan Konvensi Inti International Labour Organization (ILO) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Adapun komitmen PTBA untuk mewujudkan dan menjamin terlindunginya HAM di sepanjang rantai nilai Perusahaan dan para pemangku kepentingan, sebagai berikut:

1. Menghindari aktivitas yang dapat menimbulkan dampak buruk terhadap HAM di seluruh unit operasi, dan berkomitmen untuk mengurangi atau memperbaiki segala dampak yang mungkin terjadi, serta secara konsisten melakukan pemantauan dan pelaporan dampak bisnis terhadap HAM. Implementasi komitmen ini mencakup berbagai aspek dan tidak terbatas pada:
  - a. Menghindari terjadinya *involuntary resettlement / physical displacement / economic displacement* dari masyarakat di sepanjang rantai nilai perusahaan. Apabila tidak dapat dihindari, Perusahaan wajib menerapkan mitigasi dan pemulihan kondisi fisik maupun ekonomi bagi masyarakat terdampak, serta pemantauan dan evaluasi yang memadai.
  - b. Melakukan penanganan keamanan terhadap pegawai dan aset secara konsisten serta menghindari dampak terhadap hak pihak lainnya.



## KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA DAN MASYARAKAT ADAT

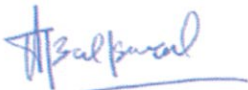
- c. Menghormati hak-hak pegawai dengan tidak mempekerjakan pegawai di bawah umur maupun pekerja paksa, menghindari perdagangan manusia, tidak memberikan akses pekerjaan yang berbahaya bagi orang dibawah 18 tahun, menghilangkan diskriminasi dan pelecehan, menghormati kebebasan berserikat, kebebasan untuk berbicara dan melakukan perundingan, jam kerja maksimum/waktu lembur, remunerasi dan upah minimum, memberikan kesempatan yang sama serta menghormati ibu hamil dan ibu menyusui.
2. Menghormati dan memastikan hak-hak masyarakat adat dihormati, dan prinsip-prinsip ILO diintegrasikan dalam semua aspek kegiatan perusahaan untuk menciptakan dampak positif pada kehidupan masyarakat adat. Implementasi komitmen ini mencakup berbagai aspek dan tidak terbatas pada:
  - a. Menghormati hak, kepentingan, aspirasi, sejarah, budaya dan sumber pendapatan yang mempengaruhi tanah, wilayah dan sumber daya alam masyarakat adat. Jika terdapat dampak kepada masyarakat adat, Perusahaan akan melaksanakan mitigasi dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat adat yang terdampak, serta melibatkan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan umpan balik.
  - b. Mengupayakan atau menghormati hak atas Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) / *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)* oleh *World Wildlife Fund (WWF)*.
  - c. Mengakui dan menghormati sifat unik dan HAM masyarakat adat, suku dan penduduk asli atas tanah, wilayah, sumber daya, struktur organisasi, ekonomi dan sosial mereka dan hak untuk konsultasi tanpa paksaan dengan itikad baik dan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman dan persetujuan sehubungan dengan tindakan mitigasi yang diusulkan.
  - d. Melindungi kawasan yang sensitif secara budaya serta mendukung pembangunan dan pengembangan sosial dan ekonomi serta pemenuhan hak untuk mempertahankan kebiasaan dan praktik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat.
  - e. Membangun hubungan yang erat, keterlibatan yang kuat, dan mengupayakan keterwakilan dan partisipasi efektif masyarakat adat yang terpengaruh proyek dan aset Perusahaan, berdasarkan prinsip-prinsip rasa hormat, kepekaan budaya, integritas, tanggung jawab, transparansi, itikad baik, dan non-diskriminasi.
3. Melaksanakan uji tuntas (*due diligence*) HAM secara berkelanjutan dan melakukan penilaian HAM berbasis risiko dalam pengambilan keputusan strategis Perusahaan diantaranya terkait kondisi kerja, diskriminasi pegawai, kesehatan dan keselamatan, keamanan, hak masyarakat adat dan kelompok rentan, menilai dampak potensial dari aktivitas Perusahaan terhadap HAM sebelum melakukan aktivitas atau hubungan bisnis baru, mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi yang tepat, memantau efektivitas tindakan yang diambil, dan mengkomunikasikan langkah-langkah yang diambil dalam rangka mencegah atau mengurangi dampak negatif terhadap HAM yang terkait langsung dengan operasi, produk, atau layanan yang diberikan melalui hubungan bisnis dengan pemasok atau entitas publik yang terkait langsung dengan kegiatan operasi Perusahaan.
4. Menyediakan sarana penyampaian keluhan atau *Grievance Mechanism* yang berlaku bagi para pegawai, kontraktor, pemangku kepentingan maupun masyarakat adat untuk menyampaikan dan menyelesaikan keluhan terkait HAM. Adapun mekanismenya tidak berarti menghilangkan hak setiap pihak untuk dapat melaporkan keluhan melalui Aparat Penegak Hukum/Lembaga Pembela HAM.
5. Melaksanakan proses rekrutmen, pembinaan karir, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan pengupahan secara obyektif, profesional, dan tanpa diskriminasi sebagaimana dijelaskan di atas dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan menghormati ketentuan yang berlaku.
6. Menolak segala jenis diskriminasi terhadap pelanggan dan pengguna produk dan layanan Perusahaan. Menghormati hak privasi pelanggan melalui upaya-upaya untuk melindungi dan menggunakan data pribadi yang diberikan kepada Perusahaan sesuai ketentuan.
7. Menjamin hak pegawai, tanpa perbedaan apapun, untuk berorganisasi dengan mendirikan atau tidak mendirikan dan bergabung atau tidak bergabung dengan serikat pegawai, atas pilihan mereka sendiri tanpa pengaruh pihak lain.

## KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA DAN MASYARAKAT ADAT

8. Melakukan upaya penyelidikan, penyelesaian dan tindak lanjut pemulihan jika terjadi pelanggaran terhadap HAM, merujuk pada pedoman yang diakui secara internasional, peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan yang berlaku serta pemberian sanksi seringan-ringannya teguran tertulis dan seberat beratnya pemutusan hubungan kerja.
9. Melakukan pendekatan HAM berbasis risiko sebagai berikut :
  - a. Menumbuhkan budaya menghormati HAM di antara pegawai PTBA, dengan menciptakan lingkungan kerja yang menghargai prinsip-prinsip HAM, menghormati keragaman dengan pengelolaan SDM tanpa membedakan etnis, ras, kebangsaan, warna kulit, agama, jenis kelamin, usia, disabilitas, serta menerapkan regulasi untuk mencegah pelanggaran HAM.
  - b. Mempertahankan tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif serta mengatasi dan memperbaiki berbagai risiko kecelakaan, cedera, dan kesehatan yang teridentifikasi.
  - c. Mengkomunikasikan dan memberikan pelatihan tentang kebijakan HAM sebagai bagian dari program *on-boarding* pegawai dan kontraktor.

Kebijakan ini dikomunikasikan, didokumentasikan, serta ditinjau secara berkala dan menjadi tanggung jawab pegawai, mitra, pelanggan, dan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan bisnis PT Bukit Asam Tbk untuk memastikan penerapan kebijakan ini sesuai dengan sasaran dan upaya perbaikan secara berkelanjutan.

Tanjung Enim, 14 Desember 2024



Arsal Ismail  
Direktur Utama





## HUMAN RIGHTS POLICY AND INDIGENOUS PEOPLE

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) is committed to respect Human Rights (HR) as well as the interests, culture, customs and values of employees and stakeholders referring to:

- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
- Law number 39 of 1999 concerning Human Rights
- Law number 13 of 2003 concerning Employment and its amendments to Law Number 11 of 2020 concerning human settlements
- Law Number 6 of 2023 concerning the stipulation of government regulations in lieu of Law Number 2 of 2022 concerning human settlements into law
- RI's Presidential Regulation Number 53 of 2021 concerning the Action Plan of National Human Rights for 2021-2025 (State Gazette of the Republic of Indonesia 2021 Number 35)
- Collective Labor Agreement for the 2023-2025 Period between PTBA and the Employees' Union (SPBA)
- Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PTBA Number 07/SK/PTBA-DEKOM/2021 and Number 40BA/01000/2021 Concerning PTBA's Code of Conduct and Business Ethics (Code of Conduct)
- Principles of The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), The United Nations Global Compact (UNGC), The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), dan The United Nations Development Programme (UNDP) Social and Environmental Standards by United Nations
- The Voluntary Principles on Security and Human Rights (VPSHR)
- The International Council on Mining and Metals (ICMM) Indigenous Peoples and Mining Position Statement
- Free, Prior and Informed Consent (FPIC) by World Wildlife Fund (WWF)
- The International Council on Mining and Metals (ICMM) Indigenous Peoples and Mining Position Statement
- Principles of Fundamental Rights at Work based on the Core Conventions of the International Labor Organization (ILO) ratified by the Government of Indonesia.

PTBA's commitments to realize and ensure the protection of human rights throughout the Company's value chain and its stakeholders are as follows:

1. Avoiding activities having a negative impact on human rights in all operating units, and committing to reduce or correct any impacts that may occur, as well as consistently monitoring and reporting business impacts on human rights. Implementation of this commitment covers various aspects and is not limited to:
  - a. Avoiding involuntary resettlement/physical displacement/economic displacement from communities along the company's value chain. If it cannot be avoided, the Company must implement mitigation and restore physical and financial conditions for affected communities, as well as adequate monitoring and evaluation.
  - b. Consistently handle security for employees and assets and avoid impacts on the rights of other parties.
  - c. Respect employee rights not employing underage employees or forced labor, avoiding human trafficking, not providing access to dangerous work for people under 18 years, eliminating discrimination and harassment, respecting freedom of association, freedom to speak and negotiate, maximum/overtime working hours, remuneration and minimum wages, providing equal opportunities and respecting pregnant and breastfeeding mothers.



## HUMAN RIGHTS POLICY AND INDIGENOUS PEOPLE

2. *Respecting and ensuring that the rights of indigenous peoples are respected, and that ILO's principles are integrated into all aspects of the company's activities to create a positive impact on the lives of indigenous peoples. Implementation of this commitment covers various aspects and is not limited to:*
  - a. *Respect the rights, interests, aspirations, history, culture and sources of income affecting the lands, territories and natural resources of indigenous peoples. If there is an impact on indigenous communities, the Company shall implement mitigation and provide sustainable benefits for affected indigenous communities, as well as involve stakeholders to provide input and feedback.*
  - b. *Strive or respect the Free, Prior and Informed Consent (FPIC) by World Wildlife Fund (WWF).*
  - c. *Recognize and respect the unique nature and human rights of indigenous peoples, tribes and indigenous peoples over their lands, territories, resources, organizational, economic and social structures and the rights to free consultation in good faith and with the aim of obtaining the understanding and agreement in relation to the mitigation measures proposed.*
  - d. *Protect culturally sensitive areas and support social and economic development and construction as well as fulfill the rights to maintain the social, economic and cultural customs and practices of indigenous peoples.*
  - e. *Build close relationships, strong involvement, and seek effective representation and participation of indigenous communities affected by the Company's projects and assets, based on the principles of respect, cultural sensitivity, integrity, responsibility, transparency, good faith, and non-discrimination.*
3. *Carrying out due diligence of human rights on an ongoing basis and carrying out risk-based human rights assessments in making strategic decisions for the Company, including those related to working conditions, employee discrimination, health and safety, security, rights of indigenous peoples and vulnerable groups, assessing the potential impact of the Company's activities on human rights before undertaking new business activities or relationships, taking appropriate preventive and mitigating actions, monitoring the effectiveness of actions taken, and communicating steps taken in order to prevent or reduce negative impacts on human rights directly related to operations, products or services provided through business relationships with suppliers or public entities directly related to the Company's operational activities.*
4. *Providing a means of submitting complaints or a Grievance Mechanism that applies to employees, contractors, stakeholders and indigenous communities to convey and resolve complaints related to human rights. The mechanism does not mean eliminating the rights of each party to report complaints through Law Enforcement Officials/Human Rights Defense Institutions.*
5. *Carrying out the recruitment process, career development, competency development, performance assessment and remuneration objectively, professionally and without discrimination as explained above by taking into account the Company's interests and respecting applicable regulations.*
6. *Rejecting all types of discrimination against customers and users of the Company's products and services. Respecting customer's privacy rights through efforts to protect and use personal data provided to the Company in accordance with provisions.*
7. *Taking action to guarantee the right of employees, without any distinction, to organize establishing or not establishing and joining or not joining an employee union, of their own choice without influence by other parties.*
8. *Carrying out efforts to investigate, resolve and follow up recovery if violations of human rights occur, referring to internationally recognized guidelines, laws and regulations and applicable policies as well as providing sanctions as light as a written warning and as heavy as termination of employment.*



## HUMAN RIGHTS POLICY AND INDIGENOUS PEOPLE

9. Taking a risk-based human rights approach as follows:

- a. Fostering a culture of respect for human rights among PTBA employees, creating a work environment that respects principles of human rights, respecting diversity managing human resources without distinction of ethnicity, race, nationality, skin color, religion, gender, age, disability, as well as implementing regulations to prevent violations of human rights.
- b. Maintaining a safe, healthy and productive workplace and addressing and correcting various identified accident, injury and health risks.
- c. Communicating and providing various trainings on human rights policies as part of on-boarding programs for employees and contractors.

*This policy is communicated, documented and reviewed periodically and is the responsibility of employees, partners, customers and all stakeholders related to the PT Bukit Asam Tbk's business to ensure that the implementation of this policy is in accordance with targets and continuous improvement efforts.*

Tanjung Enim, December 14<sup>th</sup> 2024



Arsal Ismail  
President Director





## KATA PENGANTAR

Seiring dengan meningkatnya ekspektasi global terhadap praktik usaha yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, PT Bukit Asam Tbk mengintegrasikan prinsip Environment, Social, Governance (ESG) ke dalam kegiatan operasional perusahaan sebagai fondasi penting untuk tidak hanya menciptakan nilai keuntungan ekonomi, namun juga mengelola bisnis dengan orientasi keberlanjutan.

Pedoman ini disusun sebagai sebuah framework yang selanjutnya menjadi panduan komprehensif bagi PT Bukit Asam Tbk dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola yang terintegrasi. Dimana pengintegrasian ESG ke dalam kegiatan Operasional perusahaan dapat menjadi kunci keberhasilan transformasi Perusahaan ke arah bisnis energi bersih. Oleh karena itu terdapat muatan mengenai konsep, standar, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan ESG secara terintegrasi.

Pedoman ini diharapkan dapat mendukung Perusahaan dalam merancang, menerapkan, dan memantau inisiatif ESG dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan yang mencakup efisiensi operasional, inovasi produk, dan pengelolaan risiko, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pedoman ini juga bertujuan untuk membangun reputasi yang baik yang berdampak pada akses pendanaan yang lebih luas, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengakses sumber daya finansial yang diperlukan untuk mendukung implementasi praktik bisnis berkelanjutan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini, dan semoga pedoman ini menjadi panduan yang berharga bagi perusahaan sektor batubara dalam mengembangkan praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

## PREFACE

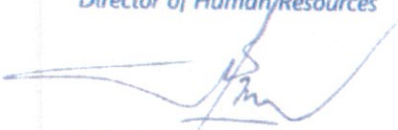
*Along with the increasing global expectations for responsible and sustainable business practices, PT Bukit Asam Tbk integrates the principles of Environment, Social, Governance (ESG) into its operational activities as a crucial foundation to not only create economic value but also manage the business with a sustainability orientation.*

*This guideline was developed as a framework that subsequently evolved into a comprehensive guide for PT Bukit Asam Tbk in implementing integrated environmental, social and governance principles. The integration of ESG into the company's operational activities can be the key to the success of the company's transformation towards clean energy business. Therefore, there are contents regarding the concept, standards, and considerations that need to be taken into account in the integrated implementation of ESG.*

*This guideline is expected to support the Company in designing, implementing and monitoring ESG initiatives in order to enhance the Company's performance, including operational efficiency, product innovation and risk management, as well as contributing to sustainable development. Furthermore, this guideline also aims to build a positive reputation, facilitating broader access to funding and enabling companies to obtain the financial resources necessary to support the implementation of sustainable business practices.*

*We extend our gratitude to all parties who contributed to the preparation of this guideline, and we hope that it will serve as a valuable resource for coal sector companies in developing sustainable and responsible business practices.*

Direktur Sumber Daya Manusia  
Director of Human Resources



Suherman



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penerapan ESG (*Environment, Social, Governance*) pada Perusahaan dapat memberikan manfaat yang signifikan tidak hanya kepada Perusahaan, namun bagi pemangku kepentingan lainnya seperti investor, pemerintah, konsumen dan masyarakat. ESG dapat menjadi suatu landasan untuk melihat keberlanjutan Perusahaan baik ditinjau dari aspek lingkungan, sosial, maupun tata kelola. Bersamaan dengan hal tersebut diperlukan sinergi dan kolaborasi seluruh satuan kerja dan para pemangku kepentingan agar dapat mencapai tujuan ESG pada Perusahaan. Karena itu PT Bukit Asam Tbk menyusun **Pedoman Environmental, Social, Governance (ESG)** yang berguna sebagai acuan bagi Perusahaan dalam menerapkan praktek-praktek keberlanjutan pada setiap proses bisnis.

### **EXECUTIVE SUMMARY**

*Application of ESG (Environment, Social, Governance) to the Company can provide significant benefits not only to the Company, but also to other stakeholders such as investors, government, consumers and society. ESG can be a basis for viewing a company's sustainability both from environmental, social and governance aspects. At the same time, synergy and collaboration between all work units and stakeholders is needed to achieve the Company's ESG goals. For this reason, PT Bukit Asam Tbk has prepared Environmental, Social, Governance (ESG) Guideline useful as a reference for companies to implementation of sustainable practices in every business process.*



**DAFTAR SINGKATAN** (*List of Abbreviations*)**PTBA**

PT Bukit Asam Tbk.

**ESG**

Environment, Social, and Governance

**SDGs**

Sustainable Development Goals

**GRK/ GHG**

Gas Rumah Kaca/ Greenhouse Gas

**TJSL**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

**CSR**

Corporate Social Responsibility

**TCFD**

Task Force on Climate-related Financial Disclosure

**MSCI**

Morgan Stanley Capital International

**CDP**

Carbon Disclosure Project

**IFC**

International Finance Corporation

**GRI**

Global Reporting Initiatives

**SASB**

Sustainability Accounting Standard Board

**IFRS**

International Finance Reporting Standard



**DAFTAR ISI** (*Table of Contents*)

<b>KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN</b> ( <i>SUSTAINABLE POLICY</i> )	<b>1</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> ( <i>PREFACE</i> )	<b>9</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> ( <i>EXECUTIVE SUMMARY</i> )	<b>10</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> ( <i>TABLE OF ABBREVIATIONS</i> )	<b>11</b>
<b>DAFTAR ISI</b> ( <i>TABLE OF CONTENTS</i> )	<b>12</b>
<b>1</b> <b>PENDAHULUAN</b> ( <i>INTRODUCTION</i> )	<b>13</b>
<b>2</b> <b>PROFIL PERUSAHAAN</b> ( <i>COMPANY PROFILE</i> )	<b>16</b>
<b>3</b> <b>MAKSUD DAN TUJUAN</b> ( <i>PURPOSES AND OBJECTIVES</i> )	<b>17</b>
<b>4</b> <b>RUANG LINGKUP</b> ( <i>SCOPE</i> )	<b>17</b>
<b>5</b> <b>ACUAN</b> ( <i>REFERENCE</i> )	<b>18</b>
<b>6</b> <b>DEFINISI</b> ( <i>DEFINITION</i> )	<b>19</b>
<b>7</b> <b>KONTEKS ORGANISASI</b> ( <i>ORGANIZATIONAL CONTEXT</i> )	<b>20</b>
<b>8</b> <b>MATERIALITAS</b> ( <i>MATERIALITY</i> )	<b>21</b>
<b>9</b> <b>PILAR KEBERLANJUTAN</b> ( <i>PILLARS OF SUSTAINABILITY</i> )	<b>27</b>
<b>10</b> <b>ESG ROADMAP</b> ( <i>ESG ROADMAP</i> )	<b>31</b>
<b>11</b> <b>ASPEK LINGKUNGAN</b> ( <i>ENVIRONMENT ASPECT</i> )	<b>33</b>
<b>12</b> <b>ASPEK SOSIAL</b> ( <i>SOCIAL ASPECT</i> )	<b>39</b>
<b>13</b> <b>ASPEK TATA KELOLA</b> ( <i>GOVERNANCE ASPECT</i> )	<b>49</b>
<b>14</b> <b>KEMITRAAN MULTI PIHAK</b> ( <i>MULTI-PARTY PARTNERSHIPS</i> )	<b>51</b>
<b>15</b> <b>MANAJEMEN RISIKO ESG</b> ( <i>ESG RISK MANAGEMENT</i> )	<b>52</b>
<b>16</b> <b>PELAPORAN ESG</b> ( <i>ESG REPORTING</i> )	<b>56</b>
<b>17</b> <b>PENILAIAN EFEKTIVITAS ESG</b> ( <i>ESG EFFECTIVENESS ASSESSMENT</i> )	<b>78</b>



**1 PENDAHULUAN**

Implementasi aspek *Environmental, Social, Governance* (ESG) di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Aspek ESG merupakan konsep yang kian menjadi perhatian banyak perusahaan dan organisasi di seluruh dunia dengan mengedepankan kegiatan pembangunan/ investasi/ bisnis yang berkelanjutan dengan tiga faktor utama, yaitu lingkungan, sosial dan tata kelola.

*Environmental, Social, Governance* (ESG) mencakup tiga dimensi yang saling terkait yaitu:

- 1) *Environmental*: memperhitungkan dampak perusahaan terhadap lingkungan dan upaya untuk mengurangi dampak tersebut, seperti penggunaan energi bersih, pengurangan limbah dan emisi gas rumah kaca, dan konservasi sumber daya alam.
- 2) *Social*: mencakup interaksi perusahaan dengan masyarakat, termasuk hak asasi manusia, kondisi kerja, diversitas dan inklusivitas, keterlibatan masyarakat, dan kesehatan dan keselamatan kerja.
- 3) *Governance*: mencakup kebijakan dan praktik perusahaan dalam hal manajemen risiko, transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, ESG telah menjadi penting dalam dunia bisnis global. Organisasi seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) dan *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB) juga telah mengembangkan standar pelaporan ESG untuk membantu perusahaan dalam pelaporan dampak sosial, lingkungan, dan tata kelola. Penerapan prinsip ESG pada perusahaan akan mendorong *responsible business* yang tidak hanya mengedepankan profit namun juga akan berorientasi terhadap aspek sosial dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman, menjamin ketenagakerjaan, meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Melalui penerapan ESG mendorong perusahaan memperhatikan aspek lingkungan seperti peningkatan efisiensi energi dan mengurangi emisi dalam setiap rantai produksi. Di sisi lain, ESG dapat mendorong terciptanya inovasi dan daya saing perusahaan sekaligus memitigasi risiko yang terjadi serta mampu mewujudkan kinerja keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan dengan tetap mempedomani prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

**1 INTRODUCTION**

The implementation of *Environmental, Social Governance* (ESG) aspect in Indonesia has experienced very significant developments. The ESG aspect is a concept that is increasingly becoming the attention of many companies and organizations around the world prioritizing sustainable development/investment/business activities with three main factors, namely environmental, social and governance factors.

*Environmental, Social, Governance* (ESG) includes three interrelated dimensions, namely:

- 1) *Environmental*: takes into account the company's impact on the environment and efforts to reduce that impact, such as the use of clean energy, reduction of waste and greenhouse gas emissions, and conservation of natural resources.
- 2) *Social*: covers company interactions with society, including human rights, working conditions, diversity and inclusion, community engagement, and occupational health and safety.
- 3) *Governance*: covers company policies and practices in terms of risk management, transparency, accountability and integrity.

Based on the above, ESG has become increasingly important in the global business landscape. Organizations such as the *Global Reporting Initiative* (GRI) and the *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB) have developed ESG reporting standards to assist companies in disclosing their social, environmental, and governance impacts. The implementation of ESG principles within a company promotes responsible business practices that not only prioritize profit but also emphasize social aspects, such as creating a safe working environment, ensuring employment, increasing local community engagement, and maintaining public trust. By adopting ESG principles, companies are encouraged to address environmental aspects, such as improving energy efficiency and reducing emissions across every production chain. At the same time, ESG fosters innovation and enhances the company's competitiveness while mitigating risks. This approach also helps achieve better and more sustainable financial performance while adhering to the principles of *Good Corporate Governance* (GCG).





Berikut ini merupakan urgensi penerapan ESG di perusahaan dari sudut pandang pemangku kepentingan:

## 1) Perusahaan

- a. Profitabilitas & pertumbuhan (efisiensi & efektifitas sumber daya)
- b. Akses terhadap permodalan (sumber keuangan berkelanjutan)
- c. Pemenuhan peraturan (compliance) dan pengelolaan risiko
- d. Keunggulan kompetitif (kinerja operasional lebih baik)
- e. Meningkatkan reputasi & branding
- f. Meningkatkan attractiveness pelaku usaha industri dan akses pasar internasional

## 2) Investor

- a. Pengelolaan risiko investasi lebih baik, terutama non-financial risk
- b. Pemenuhan peraturan (compliance) dan pengelolaan risiko
- c. Trend ESG Investing

## 3) Pemerintah

- a. Membantu mencapai target pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs)
- b. Membantu monitoring evaluasi pencapaian target NDC/ pengurangan emisi karbon
- c. Membantu mengendalikan kerusakan lingkungan
- d. Membantu melindungi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati

## 4) Masyarakat dan Konsumen

- a. Meningkatkan penciptaan kerja berbasis keberlanjutan
- b. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal dan kesejahteraan Masyarakat
- c. Meningkatkan Environmental Awareness Masyarakat

Pada tahun 2015, para pemimpin dunia menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs), sebuah cetak biru untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan global pada tahun 2030. Terdapat tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi komitmen bersama untuk mengakhiri kemiskinan, memerangi ketidaksetaraan, serta mitigasi dampak perubahan iklim. Upaya pencapaian SDGs ini juga telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia dengan menerbitkan Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap pencapaian SDGs, mendorong adanya pergeseran prioritas investasi. Minat investor dan lembaga multilateral beralih pada investasi yang berkelanjutan, yang karenanya akan sangat mempertimbangkan bagaimana program yang dijalankan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

*The following are the urgencies of implementing ESG in companies from a stakeholder perspective:*

## 1) Company

- a. Profitability & growth (resource efficiency & effectiveness)
- b. Access to capital (sustainable financial source)
- c. Fulfillment of regulations (compliance) and risk management
- d. Competitive advantage (better operational performance)
- e. Improving reputation & branding
- f. Increasing the attractiveness of industrial business players and international market access

## 2) Investor

- a. Better investment risk management, especially non-financial risk
- b. Fulfillment of regulations (compliance) and risk management
- c. ESG Investing Trends

## 3) Government

- a. Helping achieve sustainable development targets (TPB/SDGs)
- b. Assisting in monitoring and evaluating the achievement of NDC targets/carbon emission reduction
- c. Helping control environmental damage
- d. Helping protect natural resources and biodiversity

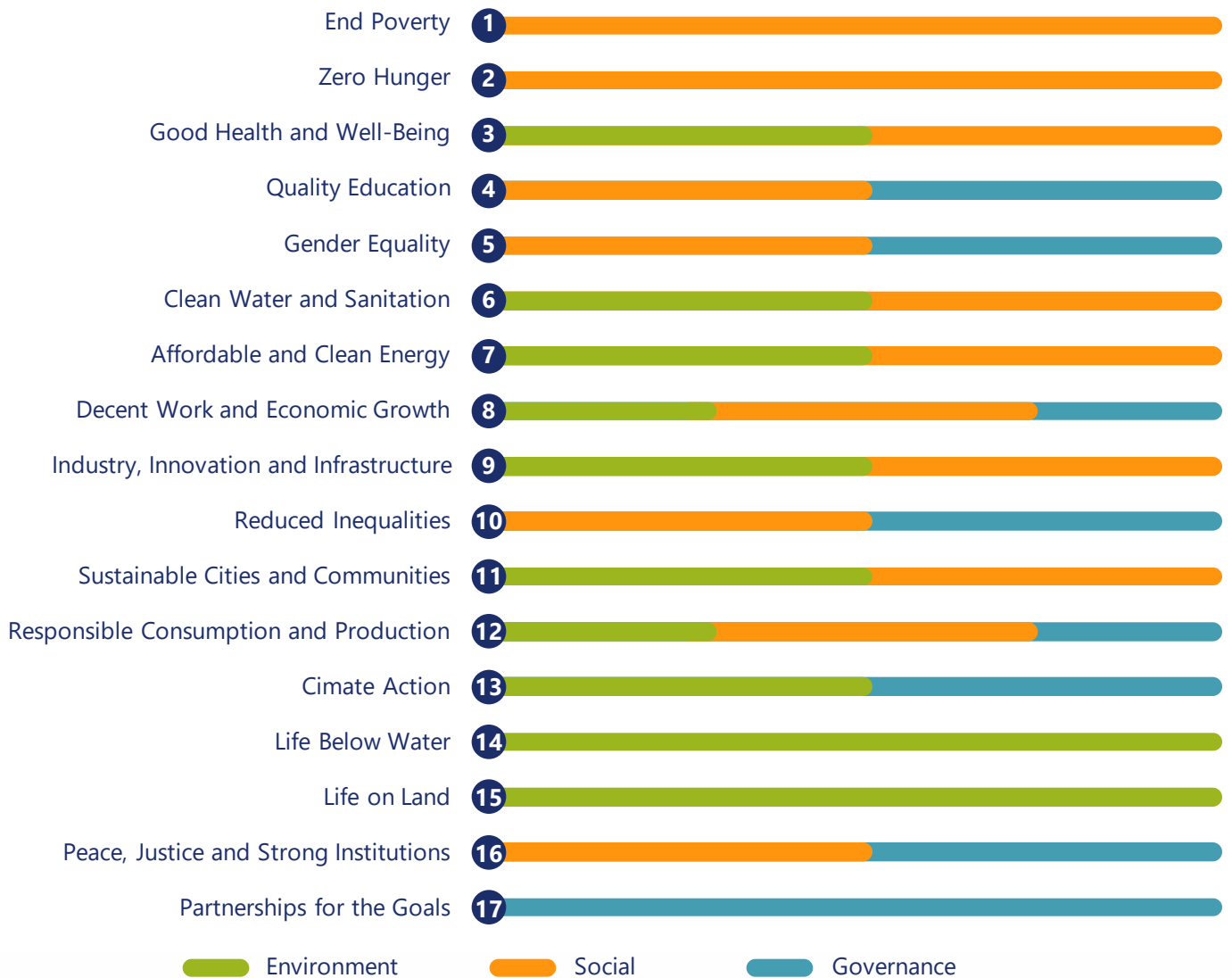
## 4) Society and Consumers

- a. Increasing sustainability-based human settlements
- b. Increasing local employment and community welfare
- c. Increasing environmental awareness in society

*In 2015, world leaders agreed on the Sustainable Development Goals or what are known as **Sustainable Development Goals** (SDGs), a blueprint for realizing global prosperity and prosperity by 2030. There are seventeen sustainable development goals that are a joint commitment to ending poverty, fighting inequality, as well as mitigating the impacts of climate change. Efforts to achieve the SDGs have also been followed up by the Indonesian Government publishing the Road Map for Indonesia's **Sustainable Development Goals** (TPB).*

*As global awareness of achieving the SDGs increases, investment priorities are shifting. The interest of investors and multilateral institutions is turning to sustainable investment, which will therefore take into account how the programs implemented pay attention at environmental, social and governance aspects.*





Implementasi konsep ESG dan SDGs sangat esensial dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Dari aspek lingkungan, ESG membantu mengurangi dampak negatif perusahaan terhadap lingkungan, seperti penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, polusi udara dan air, serta emisi gas rumah kaca. Praktik bisnis yang berkelanjutan dalam aspek lingkungan dapat mendukung ketercapaian SDGs terkait, seperti SDG 7 yaitu Energi Bersih dan Terjangkau dan SDG 13 yaitu Tindakan untuk Perubahan Iklim.

Dilihat dari faktor sosial ESG yang mana mencakup keberagaman, hak asasi manusia, kondisi kerja yang adil, dan kontribusi positif terhadap komunitas lokal. Perusahaan yang berkomitmen terhadap faktor sosial ESG dapat membantu mencapai SDGs yang terkait dengan kesejahteraan sosial, seperti SDG 1 yaitu Tidak Ada Kemiskinan dan SDG 3 yaitu Kesehatan dan Kesejahteraan.

Sedangkan untuk aspek tata kelola yang baik melibatkan praktik bisnis yang etis, transparan, dan akuntabel. Hal ini dapat membantu mengurangi praktik fraud dan meningkatkan integritas perusahaan. Prinsip tata kelola yang baik mendukung SDGs 16 terkait dengan pemerintahan yang efektif dan SDG 17 terkait kemitraan untuk mencapai tujuan.

*Implementation of ESG and SDGs concepts is essential in achieving sustainable development. From an environmental aspect, ESG helps reduce a company's negative impact on the environment, such as excessive use of natural resources, air and water pollution, and greenhouse gas emissions. Sustainable business practices in environmental aspects can support the achievement of related SDGs, such as SDG 7, namely Clean and Affordable Energy and SDG 13, namely Action on Climate Change.*

*Viewed from ESG social factors, it includes diversity, human rights, fair working conditions, and positive contributions to local communities. Companies that are committed to ESG social factors can help achieve SDGs related to social welfare, such as SDG 1, namely No Poverty and SDG 3, namely Health and Well-being.*

*Meanwhile, the aspect of good governance involves ethical, transparent and accountable business practices. It can help reduce fraudulent practices and improve company integrity. Good governance principles support SDGs 16 related to effective governance and SDG 17 related to partnerships to achieve goals.*

## 2 PROFIL PERUSAHAAN

PT Bukit Asam Tbk merupakan pertambangan batubara yang berdiri sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1919 dengan menggunakan metode penambangan terbuka, kemudian pada tahun 1923 beroperasi dengan metode penambangan bawah tanah hingga 1940, sedangkan produksi untuk komersial dimulai pada 1938. Pada tahun 1950, Pemerintah RI kemudian mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA).

Pada 1981 PN TABA kemudian berubah status menjadi perseroan terbatas dengan PT Tambang Batubara Bukit Asam. Pada 1990 Pemerintah menetapkan penggabungan perum tambang batubara dengan perusahaan. Sesuai dengan program pengembangan ketahanan energi nasional, pada 1993 pemerintah menugaskan PTBA untuk mengembangkan usaha briket batubara. Pada 23 Desember 2002, PTBA mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan nama PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk dengan kode listing "PTBA".

PT Batu bara Tbk. memiliki Visi menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan dan memiliki Misi mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi dan keunggulan insani untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi stakeholder dan lingkungannya.

Nilai-nilai budaya PTBA dikenal dengan singkatan AKHLAK, yaitu Amanah: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan, Kompeten: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, Harmonis: Saling peduli dan menghargai perbedaan, Loyal: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, Adaptif: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi setiap perubahan, Kolaboratif: Membangun kerjasama yang sinergis.

## 2 COMPANY PROFILE

*PT Bukit Asam Tbk is a coal mine company founded in the Dutch colonial era in 1919 using open-pit mining methods, then, in 1923, it was operated by using underground mining methods until 1940, while commercial production began in 1938. In 1950, the Indonesian Government then ratified the formation of the Bukit Asam Charcoal Mining State Company (PN TABA).*

*In 1981, PN TABA then changed its status to a limited liability company with PT Tambang Batubara Bukit Asam. In 1990, the Government decided to merge the coal mining company with the company. In accordance with the national energy security development program, in 1993, the government assigned PTBA to develop a coal briquette business. On December 23 2002, PTBA registered itself as a public company on the Indonesian Stock Exchange under the name of PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk with the registration code "PTBA".*

*PT Batu Bara Tbk. has a vision to become a world-class energy company that cares for the environment and has a mission to manage energy sources developing corporate competence and human excellence to provide maximum added value to stakeholders and the environment.*

*PTBA's cultural values are known by the abbreviation AKHLAK, namely Trustworthy: Upholding the trust given, Competent: Continuously learning and developing capabilities, Harmonious: Caring for each other and respecting differences, Loyal: Dedicated and prioritizing the interests of the nation and state, Adaptive: Continuously innovating and enthusiastic in driving or facing any changes, Collaborative: Building synergistic cooperation.*





**PT Bukit Asam Tbk. memiliki kegiatan utama, antara lain :**  
*(PT Bukit Asam Tbk has main activities, such as: )*

- 1** Mengusahakan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan bahan-bahan galian terutama batubara.  
*Carrying out mining, which includes general research, exploration, exploitation, processing, refining, transportation and trading of minerals, especially coal.*
- 2** Mengusahakan pengolahan lebih lanjut atas hasil dan perdagangan bahan-bahan galian terutama batubara.  
*Providing further processing of the results and trade in minerals, especially coal.*
- 3** Memperdagangkan hasil produksi sehubungan dengan usaha di atas, baik hasil sendiri maupun hasil produksi pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri.  
*Trading production results in connection with the above business, both own products and production results of other parties, both at home and abroad.*
- 4** Mengusahakan dan mengoperasikan Pelabuhan dan dermaga khusus batubara, baik untuk keperluan sendiri maupun keperluan pihak lain.  
*Managing and operating special coal ports and docks, both for the own needs and those of other parties.*
- 5** Mengusahakan dan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap, baik untuk keperluan sendiri maupun keperluan pihak lain.  
*Developing and operating Steam Power Plants, both for the own needs and those of other parties.*
- 6** Memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang terkait dengan pertambangan batubara beserta hasil-hasil olahannya.  
*Providing many consulting and engineering services in sectors related to coal mining and its processed products.*

**3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Pedoman ini disusun sebagai acuan dan panduan bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka implementasi aspek Environmental, Social, and Governance di lingkungan PT Bukit Asam Tbk. Pedoman ini diharapkan dapat mendukung kinerja perusahaan, membantu identifikasi risiko dan inovasi bisnis, meningkatkan reputasi perusahaan, memanfaatkan kesempatan bisnis, meningkatkan kualitas manajemen melalui transparansi, menjaga keberlanjutan bisnis jangka panjang, dan mendukung kinerja keuangan berkelanjutan.

**4 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pedoman ini meliputi topik materialitas, ESG framework, roadmap panduan implementasi aspek environment, social, and governance, manajemen risiko ESG, pelaporan, dan penilaian efektivitas penerapan ESG di seluruh aktivitas proses bisnis perusahaan.

**3 PURPOSES AND OBJECTIVES**

*This guideline has been prepared as a reference and guide for all stakeholders in the context of implementing the Environmental, Social and Governance aspects within PT Bukit Asam Tbk. This guideline is expected to support company performance, help identify risks and business innovation, improve company reputation, take advantage of business opportunities, improve management quality through transparency, maintain long-term business sustainability, and support sustainable financial performance.*

**4 SCOPE**

*The scope of this guideline covers the topics of materiality, ESG framework, roadmap guide for implementing the environmental, social, and governance aspects, ESG risk management, reporting, and assessing the effectiveness of ESG implementation in all company business process activities.*

**5 ACUAN**

Terdapat beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum serta kerangka pedoman dalam implementasi ESG. Adapun referensi yang digunakan dalam penyusunan pedoman ESG PT Bukit Asam adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
- United Nation Development Programme (UNDP) Social and Environmental Standards (SES)
- The World Bank Environmental and Social Framework
- International Finance Corporation (IFC)'s Environmental and Social Performance Standards
- Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
- Global Reporting Initiatives (GRI) Standards
- ESG Rating: MSCI, Sustainalytics, CDP, S&P Global, dan ICMM
- Nasdaq Framework
- ISO 14001:2018 tentang Sistem Manajemen Lingkungan
- ISO 26000:2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- ISO 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi
- ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
- Kebijakan Pelaksana tentang Pedoman Bisnis Berkelanjutan MIND ID No. KP-010/DIR/2024

**5 REFERENCE**

*There are several regulations that form the legal basis and guiding framework for implementing the ESG. The references used in preparing PT Bukit Asam's ESG guidelines are as follows:*

- 1** *Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management*
- 2** *Presidential Regulation Number 111 of 2022 concerning Implementation of the Achievement of Sustainable Development Goals*
- 3** *Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance*
- 4** *Minister of BUMN Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises*
- 5** *Minister of Environment and Forestry Regulation Number 1 of 2021 concerning Company Performance Rating Assessment Program in Environmental Management*
- 6** *United Nation Development Programme (UNDP) Social and Environmental Standards (SES)*
- 7** *The World Bank Environmental and Social Framework*
- 8** *International Finance Corporation (IFC)'s Environmental and Social Performance Standards*
- 9** *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*
- 10** *Global Reporting Initiatives (GRI) Standards*
- 11** *ESG Rating: MSCI, Sustainalytics, CDP, S&P Global, dan ICMM*
- 12** *Nasdaq Framework*
- 13** *ISO 14001:2018 concerning Environmental Management Systems*
- 14** *ISO 26000:2013 concerning Corporate Social Responsibility*
- 15** *ISO 37001:2016 concerning Anti-Bribery Management Systems*
- 16** *ISO 27001:2022 concerning Information Security Management Systems*
- 17** *ISO 45001:2018 concerning Safety and Health Management Systems*
- 18** *Policy on Sustainable Business Guidelines MIND ID No. KP-010/DIR/2024*



## 6 DEFINISI

## 6 DEFINITION

Definisi-definisi yang tertuang dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

*The definitions contained in this guideline are as follows:*

1. ESG merupakan singkatan dari *Environmental, Social, and Governance*. ESG adalah konsep yang mengedepankan kegiatan pembangunan, investasi maupun bisnis yang berkelanjutan sesuai dengan tiga kriteria tersebut yaitu lingkungan, sosial serta tata kelola.
  2. *Sustainability* atau keberlanjutan merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri
  3. *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah 17 tujuan global dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk perdamaian dan kemakmuran manusia dan planet bumi sekarang dan masa depan.
  4. *Global Reporting Initiative (GRI)* merupakan kerangka kerja untuk mendukung pelaporan lingkungan, ekonomi dan sosial.
  5. *The International Organization for Standardization (ISO)* adalah standar dalam suatu sistem manajemen untuk menjamin kualitas, keamanan, dan efisiensi produk/ layanan.
  6. *ESG framework* merupakan prinsip atau standar yang digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan bisnis berdasarkan kriteria tertentu yang berdampak positif bagi lingkungan, sosial, dan tata kelola.
  7. Topik material adalah topik yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dari perusahaan atau yang secara substansial dapat mempengaruhi penilaian dan keputusan pemangku kepentingan.
  8. *PDCA (Plan, Do, Check, dan Act)* merupakan siklus/proses penyelesaian masalah dan pengembangan berkelanjutan yang sering digunakan perusahaan.
  9. Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh seluruh kegiatan usaha.
  10. Perusahaan adalah PT Bukit Asam, Tbk.
1. *ESG is an abbreviation of Environmental, Social, and Governance. ESG is a concept that prioritizes sustainable development, investment and business activities in accordance with these three criteria, namely environmental, social and governance.*
  2. *Sustainability is the ability to meet current needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs*
  3. *Sustainable Development Goals (SDGs) are 17 global goals with 169 measurable achievements and deadlines determined by the UN as a world development agenda for peace and prosperity for humans and planet Earth now and in the future.*
  4. *The Global Reporting Initiative (GRI) is a framework to support environmental, economic and social reporting.*
  5. *The International Organization for Standardization (ISO) is a standard in a management system to guarantee the quality, safety and efficiency of products/services.*
  6. *ESG framework is a principle or standard used as a reference in business management based on certain criteria that have a positive impact on the environment, social and governance.*
  7. *Material topics are topics that reflect the company's significant economic, environmental, and social impacts or that may substantially influence stakeholder assessments and decisions.*
  8. *PDCA (Plan, Do, Check, and Act) is a cycle/process of problem solving and continuous development that is often used by companies.*
  9. *Risk management is a series of structured procedures and methodologies used to identify, measure, treat and monitor risks arising from all business activities.*
  10. *The company is PT Bukit Asam, Tbk.*

**7 KONTEKS ORGANISASI**

PT Bukit Asam Tbk. menentukan isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan yang dapat berpengaruh pada kemampuan perusahaan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari manajemen aspek Environment, Social, dan Governance (ESG). Dalam hal ini PT Bukit Asam Tbk. dapat menentukan:

1. Pihak berkepentingan yang relevan dengan dengan pengelolaan ESG
2. Kebutuhan dan harapan (persyaratan) yang relevan dari pihak berkepentingan menjadi kewajiban penataan bagi organisasi

**7 ORGANIZATIONAL CONTEXT**

PT Bukit Asam Tbk. determines internal and external issues relevant to objectives that can influence the company's ability to achieve the expected results from the management of Environmental, Social and Governance (ESG) aspects. In this case, PT Bukit Asam Tbk. can determine:

1. Interested parties relevant to ESG management
2. The relevant needs and expectations (requirements) of interested parties become a structuring obligation for the organization.



Dalam mengidentifikasi isu eksternal, perusahaan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:  
*In identifying internal issues, the company can consider the following things:*

1. Tata kelola dan struktur organisasi: bentuk perusahaan, jenis struktur organisasi, hubungan induk perusahaan, peran, tanggung jawab, dan wewenang.
2. Kepatuhan hukum
3. Kebijakan, tujuan, strategi: tujuan, visi, bisnis, tujuan dan strategi lain, dan sumber daya yang dibutuhkan
4. Kapasitas dan kapabilitas: kapasitas organisasi, kemampuan dan pengetahuan dalam hal sumber daya
5. Sistem informasi: arus informasi dan proses pengambilan keputusan serta waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaiannya
6. Hubungan, persepsi, dan nilai-nilai dari pihak yang berkepentingan internal
7. Sistem dan standar manajemen: kekuatan dan kelemahan sistem manajemen dalam Perusahaan
8. Budaya organisasi dan gaya kepemimpinan
9. Manajemen risiko

1. Governance and organizational structure: company form, type of organizational structure, parent company relationships, roles, responsibilities and authority
2. Legal compliance
3. Policies, goals, strategies: goals, vision, business, other goals and strategies, and required resources
4. Capacity and capability: organizational capacity, abilities and knowledge in terms of resources
5. Information systems: information flow and decision-making processes and the time required for the completion
6. Relationships, perceptions, and values of internal stakeholders
7. Management systems and standards: strengths and weaknesses of management systems in companies
8. Organizational culture and leadership style
9. Risk management



Dalam mengidentifikasi isu internal, perusahaan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:  
*In identifying external issues, the company can consider the following things:*

1. Politik: Meninjau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi industri atau bisnis Perusahaan
2. Ekonomi: Meninjau faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga.
3. Sosial: Memperhatikan tren demografis, pangsa pasar, nilai-nilai masyarakat, dan perubahan perilaku konsumen
4. Teknologi: Meninjau perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi industri atau produk perusahaan.
5. Lingkungan: Mempertimbangkan dampak lingkungan dan kebijakan terkait, serta tanggapan pasar terhadap isu-isu lingkungan.
6. Hukum: Meninjau perubahan dalam peraturan dan kebijakan hukum yang dapat mempengaruhi bisnis

1. Politics: Review government policies that may affect the company's industry or business
2. Economics: Review economic factors such as economic growth, inflation, and interest rates.
3. Social: Paying attention at demographic trends, market share, societal values, and changes in consumer behavior
4. Technology: Reviewing the technological developments that may affect the company's industry or products.
5. Environment: Considering the environmental impacts and related policies, as well as market responses to environmental issues.
6. Legal: Reviewing the changes in legal regulations and policies that may affect the business



## 8 MATERIALITAS

Menentukan materialitas adalah langkah kunci dalam penerapan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan (ESG) dalam suatu organisasi. Materialitas mengacu pada sejauh mana suatu aspek ESG memiliki dampak signifikan terhadap perusahaan dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Materialitas membantu perusahaan memfokuskan strategi terhadap isu-isu yang berdampak penting pada kelangsungan bisnis yang disepakati bersama oleh manajemen perusahaan.

Topik material adalah topik yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dari perusahaan atau yang secara substansial dapat mempengaruhi penilaian dan keputusan pemangku kepentingan. Penentuan topik materialitas membantu perusahaan untuk memahami aspek ESG secara mendalam. Dalam hal ini, PT Bukit Asam dapat mengacu pada beberapa referensi seperti standar Global Reporting Initiatives (GRI) di Sektor Batubara, Sustainalytics, ICM (International Council on Mining and Metals) dan referensi global lainnya. Topik material tersebut menggambarkan dampak paling signifikan di sektor batubara dan perusahaan diwajibkan untuk meninjau setiap topik material yang ditetapkan.

### Prinsip Utama Asesmen Materialitas ESG :

1. Asesmen materialitas ESG bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai faktor-faktor dari aspek ekonomi, lingkungan, sosial maupun tata kelola yang harus dikelola dalam upaya untuk mencapai keberlanjutan PT Bukit Asam Tbk.
2. Dalam menganalisis faktor-faktor dari aspek-aspek ESG tersebut perlu memperhatikan 2 (dua) perspektif, yakni potensi dampak perusahaan terhadap lingkungan dan sosial (*inside-out*) dan risiko yang dihadapi perusahaan (*outside-in*). Penggunaan 2 (dua) perspektif dalam melakukan asesmen materialitas ESG ini merupakan pendekatan dalam penggunaan konsep materialitas ganda (*double materiality*).
3. Dalam melakukan asesmen materialitas ESG, PT Bukit Asam Tbk mempertimbangkan level risiko (hasil pemetaan antara nilai dampak risiko dan probabilitas risiko) dari kejadian risiko yang terasosiasi dengan faktor-faktor yang dinilai (sesuai dengan *risk library*) dan menilai tingkat ekspektasi *stakeholder* terhadap potensi dampak, baik positif dan/atau negatif maupun langsung dan/atau tidak langsung.

## 8 MATERIALITY

*Determination of materiality is a key step in implementing Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) aspects in an organization. Materiality refers to the extent to which an ESG aspect has a significant impact on the company and its stakeholders. Materiality helps company focus its strategy on issues having an important impact on business continuity that are mutually agreed upon by company management.*

*Material topics are topics that reflect the company's significant economic, environmental, and social impacts or that may substantially influence stakeholder assessments and decisions. Determination of the topic of materiality helps company to understand ESG aspects in depth. In this case, PT Bukit Asam can refer to several references such as the Global Reporting Initiatives (GRI) standards in the Coal Sector, Sustainalytics, ICCM (International Council on Mining and Metals) and other global references. These material topics describe the most significant impact on the coal sector and company is required to review each material topic determined.*

### Main Principle of ESG Materiality Assessment :

1. *The ESG materiality assessment aims to provide information and an overview of factors from economic, environmental, social, and governance aspects that must be managed to achieve sustainability of PT Bukit Asam Tbk.*
2. *In analyzing factors from these ESG aspects, it is necessary to pay attention to 2 (two) perspectives, namely the company's potential impact on the environment and society (*inside-out*) and the risks faced by the company (*outside-in*). The use of 2 (two) perspectives in conducting ESG materiality assessments is an approach to using the double materiality concept.*
3. *In conducting ESG materiality assessments, PT Bukit Asam Tbk considers the risk level (the results of mapping between risk impact value and risk probability) of risk events associated with the assessed factors (by the risk library) and assesses the level of stakeholder expectations regarding potential impacts, both positive and/or negative as well as direct and/or indirect.*

4. Pelaksanaan asesmen materialitas ESG dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan/atau dilakukan peninjauan minimum pada saat penyusunan Laporan Keberlanjutan / *Sustainability Report*.

4. *ESG materiality assessments are carried out periodically at least once a year as part of the process of preparing the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and/or a minimum review is carried out when preparing the Sustainability Report.*



## Metodologi Asesmen Materialitas ESG :

1. Asesmen materialitas ESG yang dilakukan oleh PT Bukit Asam Tbk menilai setiap area ESG dari *Sustainability Pathway*. Penilaian terhadap setiap area ESG yang dimaksud adalah penilaian pada level risiko dan tingkat ekspektasi *stakeholder*.
2. Penilaian terhadap level risiko (*risk level*) dari setiap area ESG mengacu kepada level risiko dari kejadian risiko (*risk event*) yang telah dianalisis berdasarkan kebijakan dan/atau prosedur yang terkait dengan proses manajemen risiko (yaitu, antara lain telah mempertimbangkan dampak risiko dan probabilitas risiko). Dalam analisis tersebut, *risk library* dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi kejadian risiko yang terasosiasi dengan area ESG.
3. Apabila di dalam *risk library* PT Bukit Asam Tbk belum tersedia *risk event* yang terasosiasi dengan area ESG, dapat dilakukan identifikasi usulan *risk event* yang relevan dengan area ESG yang dimaksud, dan mengusulkan kepada fungsi yang membidangi *sustainability/ESG* di PT Bukit Asam Tbk.
4. Selanjutnya, fungsi yang membidangi *sustainability/ESG* di PT Bukit Asam Tbk memberikan umpan balik mengenai usulan *risk event* yang relevan dengan area ESG setelah berkonsultasi dengan fungsi manajemen risiko dan fungsi yang membidangi area ESG dan usulan *risk event*. *Risk level* dari setiap *risk event* sesuai dengan manajemen risiko diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok, yakni *Low*, *Moderate*, dan *High*. Jika suatu *risk event* dikelompokkan menjadi level *low to moderate* atau *moderate to high* berdasarkan hasil analisis risiko, maka level risiko yang digunakan untuk keperluan asesmen materialitas ESG adalah level risiko yang telah dinaikkan satu tingkat dengan ketentuan bahwa level risiko, yakni:
  - a. *Low to Moderate* dinaikkan menjadi *Moderate*
  - b. *Moderate to High* menjadi *High*



## ESG Materiality Assessment Methodology :

1. *The ESG materiality assessment carried out by PT Bukit Asam Tbk assesses each ESG area of the Sustainability Pathway. The assessment of each ESG area in question is an assessment of the level of risk and level of stakeholder expectations.*
2. *Assessment of the risk level of each ESG area refers to the risk level of a risk event that has been analyzed based on policies and/or procedures related to the risk management process (i.e., among other things, has considered the risk impact and risk probability). In this analysis, the risk library can be used as a tool to identify risk events associated with the ESG area.*
3. *If there are no risk events associated with the ESG area in the PT Bukit Asam Tbk risk library, risk event proposals that are relevant to the ESG area in question can be identified and proposed to the function in charge of sustainability/ESG at PT Bukit Asam Tbk.*
4. *Furthermore, the function in charge of sustainability/ESG at PT Bukit Asam Tbk provides feedback regarding proposed risk events relevant to the ESG area after consulting with the risk management function and the function in charge of the ESG area and proposed risk events. The risk level of each risk event according to risk management is classified into 3 (three) groups, namely Low, Moderate, and High. If a risk event is grouped into low to moderate or moderate to high levels based on the results of risk analysis, then the risk level used for ESG materiality assessment purposes is the risk level that has been increased by one level provided that the risk level is:*
  - a. *Low to Moderate is increased to Moderate*
  - b. *Moderate to High to High*



5. Pada tingkat ekspektasi *stakeholder*, penilaian dilakukan berdasarkan jumlah standar kinerja dan *Sustainability Report* yang mensyaratkan kriteria/parameter yang terasosiasi/relevan dengan area ESG
6. Sebagai referensi, standar kinerja dan Laporan Keberlanjutan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
  - International Council on Mining and Metals (ICMM)
  - Aluminium Stewardship Initiative (ASI)
  - United Nation Global Compact (UNGC)
  - Sustainability Accounting Standard Board (SASB): Metals and Mining and Coal Operations
  - Sustainable Development Goals (SDGs)
  - Morgan Stanley Capital International (MSCI) Index
  - Sustainalytics' Company ESG Risk Rating
  - Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
  - Responsible Minerals Initiative (RMI)
  - Climate Disclosure Project (CDP)
  - International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 & 2

5. *At the level of stakeholder expectations, the assessment is carried out based on the number of performance standards and Sustainability Reports which require criteria/parameters that are associated/relevant to the ESG area*
6. *As a reference, the performance standards and Sustainability Report referred to are as follows:*
  - *International Council on Mining and Metals (ICMM)*
  - *Aluminium Stewardship Initiative (ASI)*
  - *United Nation Global Compact (UNGC)*
  - *Sustainability Accounting Standard Board (SASB): Metals and Mining and Coal Operations*
  - *Sustainable Development Goals (SDGs)*
  - *Morgan Stanley Capital International (MSCI) Index*
  - *Sustainalytics' Company ESG Risk Rating*
  - *Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)*
  - *Responsible Minerals Initiative (RMI)*
  - *Climate Disclosure Project (CDP)*
  - *International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 & 2*

Standar-standar tersebut telah disusun melalui konsultasi publik oleh lembaga/institusi baik nasional maupun internasional. Semakin banyak jumlah standar kinerja dan Laporan Keberlanjutan yang mempersyaratkan, semakin tinggi tingkat ekspektasi *stakeholder*. Tingkat ekspektasi *stakeholder* diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok, yakni *High*, *Moderate* dan *Minimum*.

*These standards have been prepared through public consultation by both national and international institutions/institutions. The greater the number of performance standards and Sustainability Reports required, the higher the level of stakeholder expectations. The level of stakeholder expectations is classified into 3 (three) groups, namely High, Moderate and Minimum.*

Tingkat Ekspektasi <i>Expectation Level</i>	Jumlah Standar Kinerja dan Laporan Keberlanjutan yang Mempersyaratkan <i>Number of Required Performance Standards and Sustainability Reports</i>
<i>Minimum</i>	Kurang dari atau sama dengan 3 ( <i>Less than or equal to 3</i> )
<i>Moderate</i>	4 sampai dengan 6 ( <i>4 to 6</i> )
<i>High</i>	Lebih dari 7 ( <i>More than 7</i> )

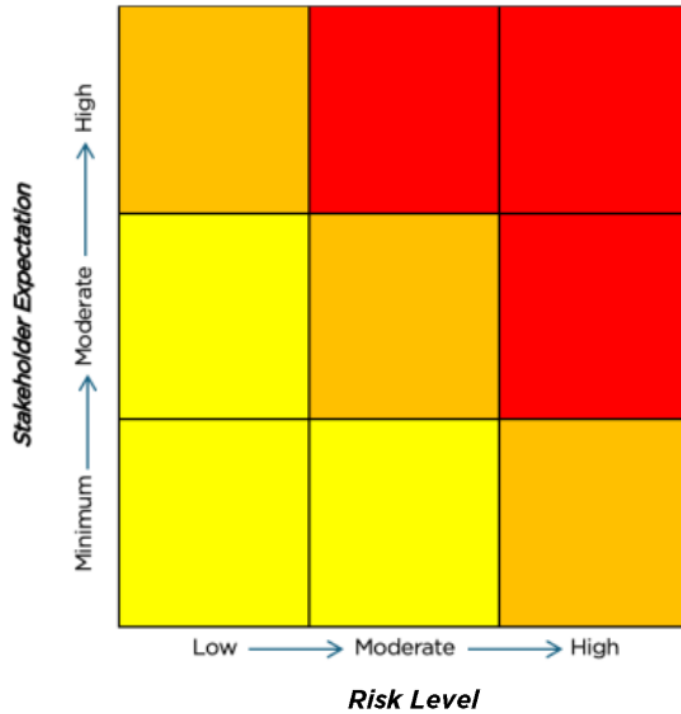
7. Hasil asesmen materialitas ESG dituangkan dalam matriks materialitas ESG yang menunjukkan hasil uji silang antara klasifikasi level risiko (sumbu X) dan klasifikasi tingkat ekspektasi *stakeholder* (sumbu Y).

7. *The results of the ESG materiality assessment are outlined in the ESG materiality matrix which shows the results of the cross-test between the risk level classification (X-axis) and the stakeholder expectation level classification (Y-axis).*

8. Persilangan antara klasifikasi level risiko dan klasifikasi tingkat ekspektasi stakeholder dari setiap area ESG akan menunjukkan Tingkat Materialitas ESG, yakni Paling Penting (*Most Important*), Sangat Penting (*Very Important*), dan Penting (*Important*).

8. *The intersection between the risk level classification and the stakeholder expectation level classification for each ESG area will indicate the ESG Materiality Level, namely Most Important, Very Important and Important.*

Matriks Materialitas ESG (*ESG Materiality Matrix*)



**Legends:**

- Paling Penting  
*Most Important*
- Sangat Penting  
*Very Important*
- Penting  
*Important*

**Tahapan Asesmen Materialitas ESG :**

Asesmen Materialitas ESG pada PT Bukit Asam Tbk dilakukan secara bertahap, dengan tahapan sebagai berikut :

**Tahap 1 – Identifikasi**

- Pada tahap ini, Perusahaan melakukan identifikasi *risk event* dari 27 (dua puluh tujuh) area ESG (berdasarkan pilar-pilar keberlanjutan) berdasarkan *risk library* PT Bukit Asam Tbk. Berikut adalah klasifikasi area ESG berdasarkan pilar-pilar keberlanjutan yang diadopsi dari *Sustainability Pathway* MIND ID sebagaimana tertera pada gambar dibawah ini:

**ESG Materiality Assessment Stages :**

*The ESG Materiality Assessment at PT Bukit Asam Tbk is carried out in stages, with the following stages:*

**Stage 1 – Identification**

- *At this stage, the Company identifies risk events from 27 (twenty seven) ESG areas (based on Sustainability pillars) based on the risk library of PT Bukit Asam Tbk. The following is a classification of ESG areas based on the sustainability pillars adopted from MIND ID's Sustainability Pathway. As shown in the image below.*



Pilar-pilar Sustainability/Sustainability Pathway



## Tahap 2 – Penilaian Awal

- Pada tahap ini, Perusahaan melakukan penilaian materialitas awal terhadap setiap area ESG.
- Penilaian level risiko (sumbu X) dari area ESG mengacu pada level risiko pada tahapan analisis manajemen risiko dari *risk event* yang relevan dengan area ESG tersebut. Level risiko yang dimaksud terbagi dalam 3 (tiga) klasifikasi, yakni *High*, *Moderate*, dan *Low*
- Penilaian tingkat ekspektasi *stakeholder* (sumbu Y) mengacu pada kesesuaian setiap area ESG dengan jumlah parameter/kriteria dari standar kinerja dan Laporan Keberlanjutan yang diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok, yakni *High*, *Moderate* dan *Minimum*.
- Penilaian silang antara level risiko (sumbu X) dan tingkat ekspektasi *stakeholder* (sumbu Y) dari setiap area ESG dituangkan dalam Matriks Materialitas ESG.

## Tahap 3 – Validasi

- Perusahaan melakukan validasi terhadap Matriks Materialitas ESG yang disusun dalam Tahap 2. Proses validasi dilakukan oleh tim lintas fungsi yang dikoordinir oleh satuan kerja yang membidangi *sustainability/ESG*.

## Tahap 4 – Persetujuan

- Perusahaan menyajikan matriks materialitas ESG kepada dewan direksi untuk mendapatkan persetujuan. Matriks materialitas ESG Perusahaan menjadi acuan dalam pengelolaan keberlanjutan baik dalam penyusunan RKAP, pengelolaan program kerja dan Laporan Keberlanjutan Perusahaan.

Dalam pelaksanaan asesmen materialitas ESG, Perusahaan dapat melibatkan tim eksternal yang dinilai memiliki keahlian, kompetensi, pengalaman atau pengaruh di bidang *sustainability/ESG*. Dalam pelibatan tim eksternal tersebut, perlu memperhatikan faktor risiko dan peluang serta nilai tambah.

## Stage 2 – Initial Assessment

- *At this stage, the Company carries out an initial materiality assessment for each ESG area.*
- *The risk level assessment (X-axis) of the ESG area refers to the risk level at the risk management analysis stage of risk events relevant to that ESG area. The risk levels referred to are divided into 3 (three) classifications, namely High, Moderate and Low*
- *Assessment of the level of stakeholder expectations (Y axis) refers to the suitability of each ESG area with the number of parameters/criteria from performance standards and the Sustainability Report which are classified into 3 (three) groups, namely High, Moderate and Minimum.*
- *The cross-assessment between the risk level (X-axis) and the level of stakeholder expectations (Y-axis) from each ESG area is outlined in the ESG Materiality Matrix.*

## Stage 3 – Validation

- *The company validated the ESG Materiality Matrix prepared in Stage 2. The validation process was carried out by a cross-functional team coordinated by the work unit in charge of sustainability/ESG.*

## Stage 4 – Agreement

- *The Company presents the ESG materiality matrix to the board of directors for approval. The Company's ESG materiality matrix is a reference in sustainability management both in preparing work plan and budget, managing work programs and the Company's Sustainability Report.*

*In implementing the ESG materiality assessment, the Company can involve an external team that is deemed to have expertise, competence, experience or influence in the field of sustainability/ESG. In involving the external team, it is necessary to pay attention to risk and opportunity factors as well as added value.*



**9 PILAR KEBERLANJUTAN**

**9 PILLARS OF SUSTAINABILITY**

Pilar keberlanjutan merupakan prinsip atau standar yang digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan bisnis berdasarkan kriteria tertentu yang berdampak positif bagi lingkungan, sosial, dan tata kelola. PT Bukit Asam, Tbk. telah menyusun pilar keberlanjutan yang mengadopsi pada praktik baik industri nasional maupun internasional. Penyusunan pilar keberlanjutan ESG juga memperhatikan standar atau prosedur lingkungan, sosial, dan tata kelola yang telah dimiliki oleh perusahaan.

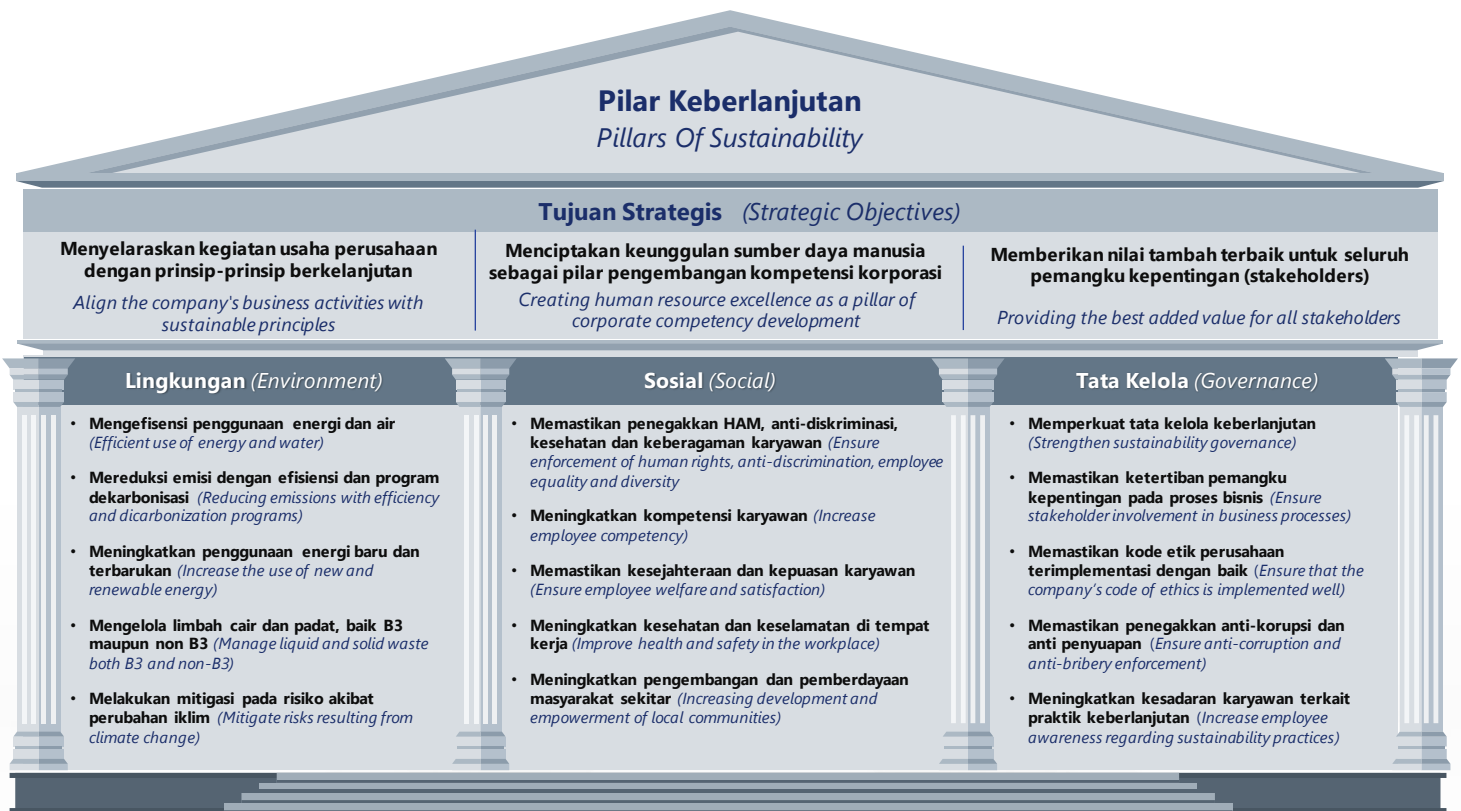
*Pillars of sustainability are principles or standards used as a reference in business management based on certain criteria having a positive impact on the environment, social and governance. PT Bukit Asam, Tbk. has developed pillars of sustainability adopting both national and international industrial practices. The preparation of ESG's pillars of sustainability also takes into account the environmental, social and governance standards or procedures that the company has in place.*

**9.1 Pilar Keberlanjutan PT Bukit Asam, Tbk.**

**9.1 Sustainability Pillars of PT Bukit Asam, Tbk.**

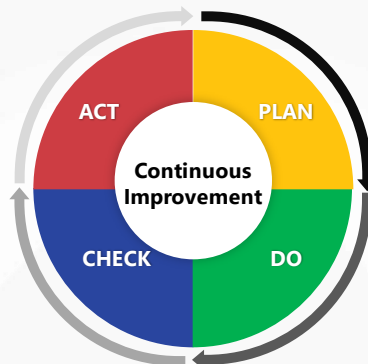
Pilar keberlanjutan ESG PT Bukit Asam, Tbk. ditunjukkan pada gambar berikut:

*Pillars of sustainability of ESG for PT Bukit Asam, Tbk. Are shown in the following figure:*



Agar implementasi kerangka kerja ESG dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang optimal, maka Bukit Asam dapat mengadopsi siklus Plan – Do – Check – Act (PDCA) sebagai berikut:

*Therefore, the implementation of the ESG framework can run effectively and provide optimal positive impacts; Bukit Asam can adopt the Plan – Do – Check – Act (PDCA) cycle as follows:*



Hubungan PDCA dengan kerangka kerja ESG (PDCA's relationship to the ESG framework)

**1 Perencanaan****Plan**

Dalam tahap ini, perusahaan merencanakan proses yang harus dilakukan yang dimulai dengan identifikasi masalah (*root cause analysis*). Pemahaman akan konteks organisasi menjadi penting agar program ESG yang direncanakan relevan dengan kondisi organisasi. Pada tahap perencanaan, yang dapat dilakukan perusahaan antara lain:

- a. **Penetapan Tujuan dan Sasaran ESG:** Identifikasi dan tetapkan tujuan-tujuan yang spesifik terkait dengan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan.
- b. **Pembentukan Tim ESG:** Membentuk tim *task force* atau fungsi khusus pengelolaan ESG beserta tupoksinya
- c. **Pengembangan Kebijakan dan Strategi:** Formulasi kebijakan dan strategi ESG yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan dan kebutuhan pemangku kepentingan
- d. **Pemetaan aspek ESG:** menyusun *mapping* kriteria ESG terhadap proses bisnis perusahaan
- e. **Menyusun *risk register* ESG:** Mengidentifikasi risiko, penyebab, dan rencana penanganan yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan yang dilihat dari aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

**2 Pelaksanaan****Do**

Dalam tahap ini, perusahaan melakukan Implementasi atau pelaksanaan proses yang sudah direncanakan oleh para pemangku kepentingan. Pada tahap pelaksanaan, yang dapat dilakukan perusahaan antara lain:

- a. **Implementasi Kebijakan:** Menerapkan kebijakan dan strategi ESG yang telah dikembangkan dalam lingkup operasional.
- b. **Integrasi Aspek ESG:** Memastikan bahwa prinsip ESG diintegrasikan ke dalam strategi bisnis jangka pendek, menengah, dan panjang.
- c. **Implementasi Inisiatif Strategis dan Program ESG:** Pelaksanaan inisiatif strategis dan program ESG oleh tim ESG dan unit kerja terkait yang mengacu pada *roadmap* dan arah pengembangan perusahaan yang telah ditetapkan.
- d. **Pelaporan ESG:** Pelaporan ESG dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, persyaratan dari standar/lembaga rating, regulasi yang berlaku, serta *need & expectation* para pemangku kepentingan, sebagaimana dijelaskan pada Bab 16 mengenai Pelaporan ESG. Khusus untuk penyusunan Laporan Keberlanjutan / *Sustainability Report* PT Bukit Asam Tbk, dikelola oleh Sekretaris Perusahaan berkoordinasi dengan seluruh satuan kerja terkait.

**1 Plan****Plan**

*In this stage, the company plans the process that must be carried out, starting with problem identification (root cause analysis). Understanding of the organizational context is important so that the planned ESG program is relevant to organizational conditions. At the planning stage, things the company can do include:do includes:*

- a. **Setting ESG Goals and Targets:** *Identify and set specific goals related to environmental, social and corporate governance aspects.*
- b. **Establishment of an ESG Team:** *Forming a task force team or a special function for ESG management and its main tasks and functions*
- c. **Policy and Strategy Development:** *Formulate ESG policies and strategies that are in line with company values and stakeholder needs*
- d. **ESG aspect mapping:** *compiling a mapping of ESG criteria to the company's business processes*
- e. **Preparing an ESG risk register:** *Identifying risks, causes and treatment plans related to the company's operational activities seen from environmental, social and governance aspects.*

**2 Do****Do**

*In this stage, the company implements or carries out the processes planned by the stakeholders. At the implementation stage, what the company can do include:*

- a. **Policy Implementing:** *Implementing ESG policies and strategies that have been developed within the operational scope.*
- b. **Integration of ESG Aspects:** *Ensure that ESG principles are integrated into short, medium and long term business strategies.*
- c. **Implementation of Strategic Initiatives and ESG Programs:** *Implementation of strategic initiatives and ESG programs by the ESG team and related work units is carried out in accordance with the company's established roadmap and development direction.*
- d. **ESG Reporting:** *ESG reporting is conducted in accordance with the company's needs, the requirements of standards / ESG rating agencies, applicable regulations, and stakeholder needs and expectations, as outlined in Chapter 16. ESG Reporting. Specifically, the Sustainability Report of PT Bukit Asam Tbk is managed by the Corporate Secretary in coordination with all relevant work units.*



**3 Pemantauan dan Evaluasi** **Check**

Dalam tahap ini, pemantauan dan evaluasi secara berkala dilakukan oleh Tim ESG dan Unit Kerja Terkait untuk memastikan implementasi program berjalan secara efektif. Pada tahap pemantauan dan evaluasi, yang dapat dilakukan perusahaan antara lain:

- a. **Pemantauan Kinerja ESG:** Menyusun sistem pemantauan kinerja ESG untuk mengukur kemajuan terhadap tujuan dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan tindak lanjut.
- b. **Audit dan Evaluasi:** Melakukan audit dan evaluasi rutin untuk memastikan bahwa kegiatan operasional sesuai dengan kebijakan ESG dan aturan yang berlaku.

**3 Check** **Check**

*In this stage, regular monitoring and evaluation is carried out by the ESG Team and Related Work Units to ensure program implementation runs effectively. At the monitoring and evaluation stages, things the company can do include:*

- a. **ESG Performance Monitoring:** Establish an ESG performance monitoring system to measure progress against goals and identify areas requiring follow-up..
- b. **Audit and Evaluation:** Conducting routine audits and evaluations to ensure that operational activities comply with ESG policies and applicable regulations.

**4 Tindak Lanjut** **Act**

Dalam tahap ini, perusahaan mengambil tindakan atau upaya perbaikan yang dilakukan secara berkala (*continuous improvement*) untuk mengatasi ketidaksesuaian atau *gap* yang muncul. Pada tahap tindak lanjut, yang dapat dilakukan perusahaan antara lain:

- a. Identifikasi peluang perbaikan dan tindakan korektif berdasarkan hasil evaluasi.
- b. Mengkomunikasikan temuan, rencana perbaikan, dan *progress*-nya kepada pemangku kepentingan.
- c. Melakukan pemutakhiran terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik-praktik ESG sesuai dengan rekomendasi internal maupun eksternal serta relevansinya terhadap perusahaan.

**4 Act** **Act**

*In this stage, the company takes action or improvement efforts carried out periodically (continuous improvement) to overcome the arising discrepancies or gaps. At the follow-up stage, what the company can do include:*

- a. Identify opportunities for improvement and corrective actions based on evaluation results.
- b. Communicate findings, improvement plans and progress to stakeholders.
- c. Updating ESG policies, procedures and practices in accordance with internal and external recommendations and their relevance to the company.



Dalam penerapan ESG, penting untuk memastikan partisipasi dan dukungan dari seluruh organisasi. Pemimpin organisasi memainkan peran utama dalam mendorong perubahan budaya dan mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG ke dalam kebijakan dan operasi sehari-hari perusahaan. Berikut adalah peran dan tanggung jawab organ pendukung implementasi ESG:

*In implementing the ESG, it is important to ensure participation and support from the entire organization. Organizational leaders play a key role in driving cultural change and integrating ESG principles into company policies and daily operations. The following are the roles and responsibilities of organs supporting the ESG implementation:*



**1 Management Puncak**

- a. Menetapkan visi dan komitmen terhadap ESG di tingkat puncak perusahaan.
- b. Memastikan kebijakan dan sasaran ESG ditetapkan dan selaras dengan konteks dan arahan strategis organisasi
- c. Menjaga akuntabilitas atas keefektifan penerapan ESG
- d. Mendorong adopsi kebijakan ESG dan integrasinya ke dalam strategi bisnis perusahaan baik jangka pendek, menengah, dan panjang.
- e. Memastikan sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan untuk inisiatif ESG
- f. Melakukan komunikasi mengenai pentingnya ESG yang efektif dan kesesuaian terhadap konsep ESG
- g. Mendukung peran manajemen yang relevan sebagai role model penerapan ESG yang bertanggungjawab



**1 Top Management**

- a. *Establish a vision and commitment to ESG at the top level of the company.*
- b. *Ensuring that the ESG policies and goals are set and aligned with the context and strategic direction of the organization*
- c. *Maintain accountability for the effectiveness of ESG implementation*
- d. *Encouraging the adoption of ESG policies and their integration into the company's short, medium and long term business strategies*
- e. *Ensure necessary resources and support for ESG initiatives*
- f. *Communicating the importance of effective ESG and conformity to the ESG concept*
- g. *Supporting the relevant management roles as role models for responsible ESG implementation.*



**2 Komite ESG**

- a. Melakukan analisis kesenjangan dan rekomendasi perbaikan/peningkatan kepada seluruh pemilik proses bisnis
- b. Melakukan studi banding ke perusahaan yang telah mengimplementasikan ESG secara konsisten dan memiliki rating yang baik
- c. Memastikan kelengkapan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan pemeringkatan ESG oleh lembaga institusi ESG rating untuk aspek Lingkungan Hidup, Sosial dan Tata Kelola
- d. Mensosialisasikan prinsip ESG kepada seluruh pemilik proses bisnis
- e. Merekomendasikan peluang perbaikan berkelanjutan atas implementasi ESG



**2 ESG Committee**

- a. *Conducting the gap analysis and recommend improvements/improvements to all business process owners*
- b. *Conducting the comparative studies with companies that have implemented ESG consistently and have good ratings*
- c. *Ensuring the completeness of information required for ESG rating activities by ESG rating institutions for Environmental, Social and Governance aspects*
- d. *Socializing the ESG principles to all business process owners*
- e. *Recommending the opportunities for continuous improvement of ESG implementation.*



**11 ASPEK LINGKUNGAN (ENVIRONMENT)**

**11 ENVIRONMENTAL ASPECT**

Aspek ini fokus pada bagaimana perusahaan berinteraksi dengan lingkungan dan mengelola dampaknya. Perusahaan harus memperhatikan cara pengelolaan lingkungan seperti pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, pengurangan limbah, keberlanjutan lingkungan, hingga perlindungan sumber daya alam. Upaya dalam mengurangi dampak lingkungan menjadi bagian integral dari tanggung jawab sosial perusahaan. Agar pengelolaan lingkungan dapat terukur dan dipertanggungjawabkan perusahaan wajib menerapkan ISO 14001 mengenai sistem manajemen lingkungan. Dalam lingkup sistem manajemen lingkungan yang telah ditetapkan, perusahaan menentukan aspek lingkungan dari kegiatan, produk, dan jasanya yang dapat dikendalikan dan dipengaruhi oleh organisasi, serta dampak lingkungan terkait.



*This aspect focuses on how the company interacts with the environment and manages its impacts. Company must pay attention at environmental management methods such as reducing carbon emissions, energy efficiency, reducing waste, environmental sustainability, and protecting natural resources. Efforts to reduce environmental impacts are an integral part of corporate social responsibility. Therefore, the environmental management can be measured and accounted for, company is required to implement ISO*

*14001 regarding environmental management systems. Within the scope of an established environmental management system, a company determines the environmental aspects of its activities, products and services controllable and influenced by the organization, as well as the associated environmental impacts.*

Berikut adalah pendekatan P-D-C-A dalam rangka meningkatkan keberlanjutan dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan:

*The following is the P-D-C-A approach in order to increase sustainability and minimize the impact on the environment:*

**1 Perencanaan**

**(Plan)**

Perencanaan dalam aspek lingkungan antara lain:

- a. Identifikasi aspek lingkungan yang mungkin mempengaruhi operasi pertambangan batubara seperti emisi gas rumah kaca, limbah, air, perubahan lahan, dan lain-lain.
- b. Menetapkan tujuan dan sasaran lingkungan pada fungsi dan tingkatan yang relevan, dengan memperhitungkan aspek lingkungan penting organisasi dan kewajiban penataan yang terkait serta mempertimbangkan risiko dan peluang. Penetapan sasaran lingkungan harus konsisten dengan kebijakan lingkungan, terukur, dipantau, dikomunikasikan, dan dimutakhirkan.
- c. Menyusun tata kelola meliputi kebijakan dan/atau prosedur terkait aspek lingkungan yang mendukung tujuan berkelanjutan dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.
- d. Penyusunan inisiatif dan program strategis terkait lingkungan
- e. Menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan, memelihara, dan memperbaiki manajemen lingkungan secara berkelanjutan

**1 Plan**

**(Plan)**

*Plan in environmental aspects is to:*

- a. *Identify environmental aspects that may affect coal mining operations such as greenhouse gas emissions, waste, water, land changes, etc.*
- b. *Establish environmental goals and objectives at relevant functions and levels, taking into account the organization's important environmental aspects and related regulatory obligations and considering risks and opportunities. Setting of environmental targets must be consistent with environmental policies, measurable, monitored, communicated and updated.*
- c. *Develop governance including policies and/or procedures related to environmental aspects that support sustainable goals and compliance with environmental regulations.*
- d. *Prepare strategic initiatives and programs related to the environment*
- e. *Prepare the resources needed to implement, maintain and improve environmental management on an ongoing basis.*

**2 Pelaksanaan**

**(Do)**

Pelaksanaan dalam konteks lingkungan antara lain:

- a. Implementasi ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan
- b. Implementasi tata kelola perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan

**3 Pemantauan dan Evaluasi**

**(Check)**

Pemantauan dan evaluasi dalam konteks lingkungan antara lain:

- a. Perusahaan harus memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja lingkungan organisasi
- b. Menetapkan objek atau area yang akan dipantau dan diukur
- c. Penetapan periode, metode, dan kriteria yang digunakan untuk memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja lingkungan untuk memastikan keabsahan hasil
- d. Implementasikan sistem pemantauan lingkungan untuk memantau emisi, kualitas air, dan dampak lingkungan lainnya.

**4 Tindak Lanjut**

**(Act)**

Tindak lanjut dalam konteks lingkungan antara lain:

- a. Identifikasi peluang perbaikan untuk meningkatkan kinerja lingkungan
- b. Komunikasikan hasil audit/ temuan baik internal maupun eksternal dan langkah-langkah perbaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, pemerintah, dan investor.
- c. Tinjauan manajemen terhadap penerapan sistem manajemen lingkungan organisasi pada interval waktu yang telah direncanakan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan

Tindak lanjut dalam Implementasi aspek lingkungan di sektor batubara merupakan tantangan besar oleh karena industri ini memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan, terutama terkait dengan ekstraksi batubara, pemrosesan, dan penggunaannya sebagai sumber energi. Meskipun begitu, ada beberapa strategi dan praktik pertambangan berkelanjutan yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan keberlanjutan di sektor batubara. Berdasarkan GRI 12 untuk sektor batubara terdapat topik material dalam aspek lingkungan yang menjadi perhatian perusahaan adalah sebagai berikut:teks lingkungan antara lain:

**2 Do**

**(Do)**

*Do in an environmental context is:*

- a. *Implementation of ISO 14001 concerning Environmental Management Systems*
- b. *Implementation of corporate governance related to environmental management*

**3 Check**

**(Check)**

*Check in the environmental context means:*

- a. *Company must monitor, measure, analyze and evaluate the environmental performance of the organization*
- b. *Company determines the object or area to be monitored and measured*
- c. *Determination of the period, methods and criteria used to monitor, measure, analyze and evaluate environmental performance to ensure the validity of the results*
- d. *Implements an environmental monitoring system to monitor emissions, water quality, and other environmental impacts.*

**4 Act**






**(Act)**

*Act in the environmental context is to:*







- a. *Identify improvement opportunities to improve environmental performance*
- b. *Communicate audit results/findings both internal and external and corrective steps to interested parties, such as the community, government and investors.*
- c. *Review the implementation of the organization's environmental management system at planned time intervals to ensure suitability, adequacy and effectiveness*

*Implementation of environmental aspects in the coal sector is a big challenge because this industry has a significant impact on the environment, especially related to coal extraction, processing and use as an energy source. However, there are several sustainable mining strategies and practices that can be implemented to reduce negative impacts and increase sustainability in the coal sector. Based on GRI 12 for the coal sector, there are material topics in environmental aspects that are of concern to company, namely as follows:*












NO	TOPIK MATERIAL (MATERIAL TOPIC)	KETERANGAN (DESCRIPTION)	HARMONISASI ESG (SDGS HARMONIZATION)
1.	<p>Emisi GRK</p> <p><i>GHG emissions</i></p>	<p>Emisi GRK terdiri dari emisi udara yang turut menyebabkan perubahan iklim, seperti karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dan metana (CH<sub>4</sub>). Topik ini mencakup emisi GRK langsung (Cakupan 1) dan emisi energi GRK tidak langsung (Cakupan 2) yang terkait aktivitas organisasi, serta emisi GRK tidak langsung (Cakupan 3) lainnya yang terjadi di dalam kegiatan hulu dan hilir organisasi</p> <p><i>GHG emissions consist of air emissions that contribute to climate change, such as carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) and methane (CH<sub>4</sub>). This topic includes direct GHG emissions (Scope 1) and indirect GHG energy emissions (Scope 2) related to the organization's activities, as well as other indirect GHG emissions (Scope 3) that occur in the organization's upstream and downstream activities.</i></p>	  
2.	<p>Adaptasi, ketahanan, dan transisi iklim</p>	<p>Adaptasi, ketahanan, dan transisi iklim adalah bagaimana cara suatu perusahaan menyesuaikan diri dengan risiko terkait perubahan iklim saat ini dan yang diperkirakan, serta bagaimana perusahaan turut berkontribusi pada kemampuan masyarakat dan ekonomi untuk bertahan dari dampak perubahan iklim. Topik ini mencakup strategi perusahaan yang berkaitan dengan transisi menuju ekonomi rendah karbon dan dampak transisi tersebut terhadap pekerja dan masyarakat setempat.</p>	 



NO	TOPIK MATERIAL (MATERIAL TOPIC)	KETERANGAN (DESCRIPTION)	HARMONISASI ESG (SDGS HARMONIZATION)
4.	<p>Emisi udara</p> <p><i>Air emissions</i></p>	<p>Emisi udara meliputi polutan yang memiliki dampak negatif terhadap kualitas udara dan ekosistem, termasuk kesehatan makhluk hidup. Topik ini membahas dampak dari emisi belerang oksida (SOx), nitrogen oksida (NOx), materi partikulat (PM), senyawa organik volatil (VOC), karbon monoksida (CO), dan logam berat seperti timah, air raksa, dan kadmium.</p> <p><i>Air emissions include pollutants having a negative impact on air quality and ecosystems, including the health of living creatures. This topic discusses the impact of emissions of sulfur oxides (SOx), nitrogen oxides (NOx), particulate matter (PM), volatile organic compounds (VOC), carbon monoxide (CO), and heavy metals such as lead, mercury, and cadmium.</i></p>	  
5.	<p>Keanekaragaman hayati</p> <p><i>Biodiversity</i></p>	<p>Keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman diantara makhluk hidup. Keanekaragaman hayati tidak hanya memiliki nilai intrinsik, tetapi juga penting untuk kesehatan manusia, ketahanan pangan, kemakmuran ekonomi, dan mitigasi perubahan iklim serta adaptasi pada dampaknya.</p> <p><i>Biodiversity is the diversity of living things. Biodiversity not only has intrinsic value, but is also important for human health, food security, economic prosperity, and</i></p>	  



NO	TOPIK MATERIAL (MATERIAL TOPIC)	KETERANGAN (DESCRIPTION)	HARMONISASI ESG (SDGS HARMONIZATION)
6.	<p>Limbah</p> <p><i>Waste</i></p>	<p><i>mitigating climate change and adapting to its impacts.</i></p> <p>Topik ini membahas dampak dari limbah termasuk sebagai akibat dari aktivitas konstruksi dan rehabilitasi.</p> <p><i>This topic discusses the impact of waste, as a result of construction and rehabilitation activities.</i></p>	    
7.	<p>Air dan efluen</p> <p><i>Water and effluent</i></p>	<p>Topik ini membahas dampak-dampak terkait pengambilan dan konsumsi air serta kualitas air yang dibuang</p> <p><i>This topic discusses impacts related to water extraction and consumption as well as the quality of the water discharged</i></p>	   

**12 ASPEK SOSIAL (SOCIAL)**

**12 ASPEK SOSIAL (SOCIAL)**

Aspek ini menekankan hubungan perusahaan dengan karyawan, konsumen, dan masyarakat luas. Perusahaan harus memastikan bahwa karyawan mendapat perlakuan yang adil dan aman, termasuk dalam hal remunerasi, hak asasi manusia, keselamatan & kesehatan kerja, pendidikan & pelatihan, keragaman & kesempatan yang setara. Sementara hubungan konsumen berupa kualitas produk atau layanan, keamanan, dan kepuasan konsumen. Selain itu, perusahaan berkontribusi pada



komunitas lokal atau masyarakat di sekitarnya, baik melalui dukungan finansial maupun melalui proyek-proyek sosial yang bermanfaat. Upaya pengelolaan aspek sosial tercermin dari inisiatif corporate social responsibility (CSR). CSR merujuk pada kewajiban dan tanggung jawab etis yang melekat pada suatu perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif pada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Ini mencakup tindakan dan kebijakan perusahaan yang melebihi kewajiban hukum dan ekonomi dasar, dengan fokus pada kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam memberikan panduan pengelolaan CSR, perusahaan menerapkan ISO 26000 sebagai panduan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Terdapat 7 subjek inti dalam tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut:

1. Tata Kelola Organisasi (*Organizational Governance*)
2. Hak Asasi Manusia (*Human Rights*)
3. Praktik Ketenagakerjaan (*Labour Practices*)
4. Lingkungan (*The Environment*)
5. Prosedur Operasi yang Wajar (*Fair Operating Procedures*)
6. Isu Konsumen (*Consumer issues*)
7. Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (*Community Involvement*)

Implementasi aspek sosial dalam konteks ESG di perusahaan pertambangan batubara merupakan langkah kritis untuk memastikan bahwa operasi perusahaan memberikan dampak positif (creating shared values) pada masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut adalah pendekatan P-D-C-A dalam rangka meningkatkan keberlanjutan terhadap aspek sosial:

*This aspect emphasizes the company's relationship with employees, consumers and the public. Company must ensure that employees receive fair and safe treatment, in terms of remuneration, human rights, occupational safety & health, education & training, diversity & equal opportunities. Meanwhile, consumer relations take the form of product or service quality, safety and consumer satisfaction. In addition, the company contributes to the local community or surrounding communities, either through financial*

*support or through useful social projects. Efforts to manage social aspects are reflected in corporate social responsibility (CSR) initiatives. CSR refers to the ethical obligations and responsibilities inherent in a company to operate sustainably and have a positive impact on society and other stakeholders. It includes corporate actions and policies that go beyond basic legal and economic obligations, with a focus on positive contributions to society and the environment. In providing CSR management guidance, the company applies ISO 26000 as a guide for implementing corporate social responsibility.*

*There are 7 core subjects in corporate social responsibility as follows:*

1. *Organizational Governance*
2. *Human Rights*
3. *Labour Practices*
4. *The Environment*
5. *Fair Operating Procedures*
6. *Consumer issues*
7. *Community Involvement*

*Implementation of social aspects in the ESG context in coal mining company is a critical step to ensure that company operations have a positive impact (creating shared values) on local communities and other stakeholders. The following is the P-D-C-A approach in order to increase sustainability regarding social aspects:*

**1 Perencanaan**

**(Plan)**

Tahap perencanaan dalam konteks sosial antara lain:

- a. Identifikasi dan klasifikasikan pemangku kepentingan sosial, seperti masyarakat lokal, pekerja, dan kelompok masyarakat terdampak.
- b. Merancang kebijakan sosial yang mencakup hak pekerja, keamanan dan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan konflik.
- c. Menyusun program TJSJL sesuai dengan arah pengembangan SDGs nasional

**2 Pelaksanaan**

**(Do)**

Tahap pelaksanaan dalam konteks sosial antara lain:

- a. Implementasi program pemberdayaan karyawan seperti pengembangan kapabilitas, hak asasi manusia, dan keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Implementasi program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan, dukungan kewirausahaan, dan program kesejahteraan masyarakat.

**3 Pemantauan dan Evaluasi**

**(Check)**

Tahap pemantauan dan evaluasi dalam konteks sosial antara lain:

- a. Evaluasi penerapan program pemberdayaan tenaga kerja dan masyarakat
- b. Evaluasi dampak tanggung sosial perusahaan
- c. Melakukan survei kepuasan terhadap masyarakat sekitar tambang secara berkala

**4 Tindak Lanjut**

**(Act)**

Tahap tindak lanjut dalam konteks sosial antara lain:

- a. Identifikasi peluang perbaikan program strategis yang telah dilaksanakan
- b. Komunikasikan hasil audit atau temuan dan langkah-langkah perbaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, pemerintah, dan investor.

Implementasi aspek sosial di dalam strategi ESG adalah investasi jangka panjang yang tidak hanya mendukung keberlanjutan perusahaan, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menciptakan dasar yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan dan menjaga lisensi sosial yang dibutuhkan untuk beroperasi di masyarakat. Adapun topik material dalam aspek sosial yang menjadi perhatian perusahaan adalah sebagai berikut:

**1 Plan**

**(Plan)**

The plan stage in a social context is to :

- a. Identify and classify social stakeholders, such as local communities, workers and affected community groups.
- b. Design social policies that include workers' rights, safety and health, community empowerment, and conflict management.
- c. Develop a TJSJL program in accordance with the direction of national SDGs development.

**2 Do**

**(Do)**

Do is:

- a. Implementation of employee empowerment programs such as capability development, human rights, and occupational safety and health.
- b. Implementation of community empowerment programs such as skills training, entrepreneurship support, and community welfare programs.

**3 Check**

**(Check)**

The Check stages in a social context are:

- a. Evaluation of the implementation of workforce and community empowerment programs
- b. Evaluation of the impact of corporate social responsibility
- c. Implementation of regular satisfaction surveys of communities around the mine.

**4 Act**

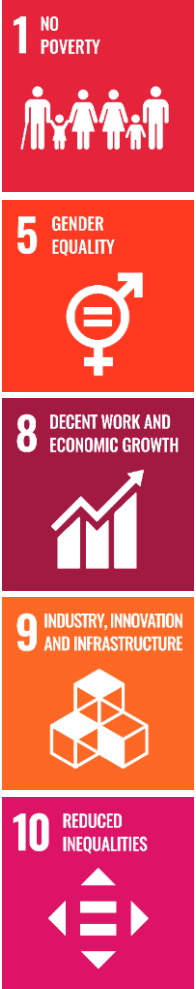
**(Act)**









The act stages in a social context are to:

- a. Identify opportunities to improve strategic programs that have been implemented
- b. Communicate audit results or findings and corrective steps to interested parties, such as the community, government and investors.

Implementation of social aspects in an ESG strategy is a long-term investment that not only supports company sustainability, but also creates added value for stakeholders and society as a whole. It creates a strong foundation for sustainable growth and maintains the social license needed to operate in society. The material topics in the social aspect that are of concern to the company are as follows:




NO	TOPIK MATERIAL (MATERIAL TOPIC)	KETERANGAN (DESCRIPTION)	HARMONISASI ESG (HARMONIZATION ESG)
1.	<p><b>Dampak ekonomi</b></p> <p><i>Economic impact</i></p>	<p>Dampak organisasi terhadap ekonomi berkenaan dengan bagaimana nilai yang dihasilkan organisasi mempengaruhi sistem ekonomi, misalnya, sebagai akibat dari praktik pengadaan dan perekrutan pekerja. Investasi infrastruktur dan layanan yang didukung oleh organisasi juga dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan jangka panjang. Topik ini membahas dampak ekonomi pada tingkat lokal, nasional, dan global.</p> <p><i>An organization's impact on the economy concerns how the value an organization produces affects the economic system, for example, as a result of worker procurement and hiring practices. Investments in infrastructure and services supported by organizations can also have an impact on community welfare and long-term development. This topic discusses economic impacts at local, national, and global levels.</i></p>	
2.	<p><b>Komunitas lokal</b></p>	<p>Komunitas lokal terdiri dari individu yang tinggal atau bekerja di area yang terpengaruh/terdampak atau yang dapat terpengaruh oleh aktivitas organisasi. Organisasi diharapkan untuk menjalankan keterlibatan masyarakat untuk memahami kerentanan komunitas lokal dan bagaimana mereka mungkin</p>	


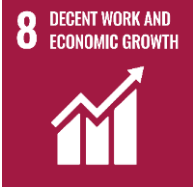



NO	TOPIK MATERIAL (TOPIC MATERIAL)	KETERANGAN (NOTE)	HARMONISASI ESG (HARMONIZATION ESG)
	<i>Local community</i>	<p>terpengaruh dengan aktivitas organisasi. Topik ini membahas dampak sosial-ekonomi, budaya, kesehatan, dan hak asasi manusia terhadap masyarakat setempat.</p> <p><i>The local community consists of individuals who live or work in the area affected/impacted or who could be affected by the organization's activities. Organizations are expected to undertake community engagement to understand the vulnerabilities of local communities and how they may be affected by the organization's activities. This topic discusses the socio-economic, cultural, health and human rights impacts on local communities.</i></p>	    
3.	<p><b>Hak atas tanah dan sumber daya</b></p> <p><i>Rights to land and resources</i></p>	<p>Hak atas tanah dan sumber daya terdiri dari hak-hak untuk menggunakan, mengelola, dan mengendalikan tanah, perikanan, kehutanan, dan sumber daya alam lainnya. Topik ini membahas dampak dari penggunaan tanah dan sumber daya alam oleh organisasi terhadap hak asasi manusia dan hak penguasaan, termasuk dampak dari pemukiman kembali komunitas lokal.</p> <p><i>Land and resource rights consist of the rights to use, manage and control land, fisheries, forestry and other natural resources. This topic discusses the impact of</i></p>	  

NO	TOPIK MATERIAL (TOPIC MATERIAL)	KETERANGAN (NOTE)	HARMONISASI ESG (HARMONIZATION ESG)
4.	<p><b>Hak masyarakat adat</b></p> <p><i>Rights of indigenous peoples</i></p>	<p><i>organizations' use of land and natural resources on human rights and tenure rights, including the impact of resettlement of local communities.</i></p> <p>Masyarakat adat memiliki risiko lebih tinggi mengalami dampak negatif yang lebih parah sebagai akibat dari aktivitas organisasi. Masyarakat adat memiliki hak kolektif dan individu, seperti yang dicantumkan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Masyarakat Adat dan instrumen internasional resmi tentang hak asasi manusia. Topik ini membahas dampak terhadap hak masyarakat adat.</p> <p><i>Indigenous communities are at higher risk of experiencing more severe negative impacts as a result of organizational activities. Indigenous peoples have collective and individual rights, as outlined in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and official international instruments on human rights. This topic discusses the impact on the rights of indigenous peoples.</i></p>	
5.	<p><b>Konflik dan keamanan</b></p>	<p>Aktivitas organisasi dapat memicu konflik atau, dalam kasus konflik yang sudah ada, meningkatkan konflik tersebut.</p> <p>Penggunaan petugas keamanan untuk mengelola konflik dapat memainkan</p>	



NO	TOPIK MATERIAL (TOPIC MATERIAL)	KETERANGAN (NOTE)	HARMONISASI ESG (HARMONIZATION ESG)
	<p><i>Conflict and security</i></p>	<p>peran penting dalam memungkinkan organisasi beroperasi dengan aman dan produktif tetapi juga berpotensi mempengaruhi hak asasi manusia. Topik ini membahas praktik pengamanan organisasi dan pendekatannya terhadap operasi di daerah konflik.</p> <p><i>Organizational activities can trigger conflict or, in the case of existing conflict, escalate it. The use of security personnel to manage conflict can play an important role in enabling organizations to operate safely and productively but also has the potential to impact human rights. This topic discusses the organization's security practices and its approach to operations in conflict areas.</i></p>	
<p><b>6.</b></p>	<p><b>Keandalan aset dan manajemen krisis</b></p> <p><i>Asset reliability and crisis management</i></p>	<p>Keandalan aset dan manajemen krisis berhubungan dengan pencegahan dan pengendalian insiden yang dapat menyebabkan kematian, cedera atau penyakit, dampak lingkungan, serta kerusakan pada komunitas lokal dan infrastruktur. Topik ini membahas dampak dari insiden tersebut serta pendekatan organisasi dalam pengelolanya</p> <p><i>Asset reliability and crisis management relate to preventing and controlling incidents that could cause death, injury or illness, environmental impacts, and damage to local communities and</i></p>	 

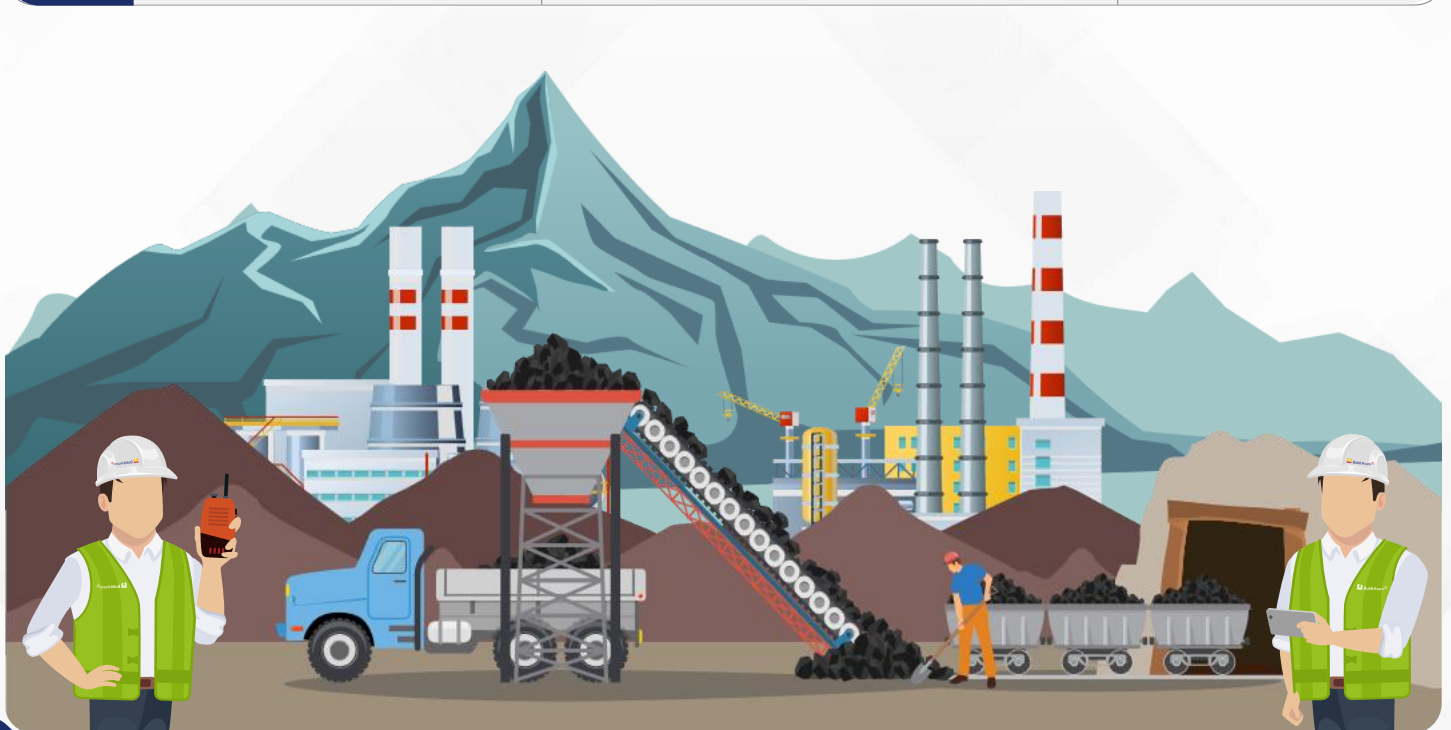
NO	TOPIK MATERIAL (TOPIC MATERIAL)	KETERANGAN (NOTE)	HARMONISASI ESG (HARMONIZATION ESG)
7.	<p><b>Kesehatan dan keselamatan kerja</b></p> <p><i>Occupational Health and Safety</i></p>	<p><i>infrastructure. This topic discusses the impact of the incident as well as the organization's approach to managing it</i></p> <p>Kondisi kerja yang sehat dan aman diakui sebagai hak asasi manusia. Kesehatan dan keselamatan kerja melibatkan pencegahan bahaya fisik dan mental bagi pekerja dan mendukung kesehatan pekerja. Topik ini membahas dampak terkait kesehatan dan keselamatan kerja.</p> <p><i>Healthy and safe working conditions are recognized as a human right. Occupational health and safety involves preventing the physical and mental harm to workers and supporting worker health. This topic discusses impacts related to occupational health and safety.</i></p>	
8.	<p><b>Praktik ketenagakerjaan</b></p> <p><i>Employment practices</i></p>	<p>Praktik ketenagakerjaan merupakan pendekatan organisasi terhadap penciptaan lapangan kerja, masa kerja, dan kondisi kerja bagi para pekerja. Topik ini juga mencakup ketenagakerjaan dan kondisi kerja dalam rantai pasokan organisasi.</p> <p><i>Employment practices are an organization's approach to human settlements, length of service, and working conditions for workers. This topic also includes employment and working conditions in an organization's supply chain.</i></p>	

NO	TOPIK MATERIAL (TOPIC MATERIAL)	KETERANGAN (NOTE)	HARMONISASI ESG (HARMONIZATION ESG)
9.	<p><b>Pekerja anak</b></p> <p><i>Child labor</i></p>	<p>Pekerja anak didefinisikan sebagai pekerjaan yang mencabut anak-anak dari masa kecil, potensi, dan martabat, serta berbahaya bagi perkembangan mereka termasuk dengan cara mengganggu pendidikan mereka. Hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan penghapusan pekerja anak adalah prinsip dan hak dasar di tempat kerja.</p> <p><i>Child labor is defined as work that deprives children of childhood, potential and dignity, and is harmful to their development, such as disrupting their education. It is a violation of human rights and the elimination of child labor is a basic principle and right in the workplace.</i></p>	  
10.	<p><b>Kerja paksa dan perbudakan modern</b></p> <p><i>Forced labor and modern slavery</i></p>	<p>Kerja paksa didefinisikan sebagai semua pekerjaan atau layanan yang dituntut dari siapa pun yang berada di bawah ancaman hukuman dan bahwa orang tersebut tidak menawarkan diri secara sukarela. Kebebasan dari kerja paksa merupakan hak asasi manusia dan hak dasar di tempat kerja. Topik ini membahas pendekatan organisasi untuk mengidentifikasi dan menangani kerja paksa dan perbudakan modern.</p> <p><i>Forced labor is defined as any work or service required of anyone under threat of punishment and that the person does not</i></p>	 



NO	TOPIK MATERIAL (TOPIC MATERIAL)	KETERANGAN (NOTE)	HARMONISASI ESG (HARMONIZATION ESG)
11.	<p><b>Kebebasan berserikat dan perundingan kolektif</b></p> <p><i>Freedom of association and collective bargaining</i></p>	<p><i>offer voluntarily. Freedom from forced labor is a human right and a basic right in the workplace. This topic discusses organizational approaches to identifying and addressing the forced labor and modern slavery.</i></p> <p>Kebebasan berserikat dan perundingan kolektif merupakan hak asasi manusia dan hak dasar di tempat kerja. Hak tersebut mencakup hak perusahaan dan pekerja untuk membentuk, bergabung, dan menjalankan organisasi mereka tanpa otorisasi atau gangguan sebelumnya, dan untuk melakukan perundingan kolektif tentang syarat dan ketentuan pekerjaan. Topik ini membahas pendekatan organisasi dan dampak yang berkaitan dengan kebebasan berserikat dan perundingan kolektif</p> <p><i>Freedom of association and collective bargaining are human rights and basic rights in the workplace. These rights include the rights of company and workers to form, join, and run the organizations without prior authorization or interference, and to engage in collective bargaining on terms and conditions of employment. This topic discusses organizational approaches and impacts related to freedom of association and collective bargaining</i></p>	 

NO	TOPIK MATERIAL (TOPIC MATERIAL)	KETERANGAN (NOTE)	HARMONISASI ESG (HARMONIZATION ESG)
12.	<p><b>Non Diskriminasi dan peluang setara</b></p> <p><i>Non-discrimination and equal opportunities</i></p>	<p>Kebebasan dari diskriminasi merupakan hak asasi manusia dan hak dasar di tempat kerja. Diskriminasi dapat memberikan beban yang tidak setara kepada individu atau menghindarkan peluang adil berdasarkan prestasi individu. Topik ini membahas dampak dari diskriminasi dan praktik yang terkait dengan keanekaragaman, inklusi, dan peluang setara.</p> <p><i>Freedom from discrimination is a human right and a fundamental right in the workplace. Discrimination can place an unequal burden on individuals or prevent fair opportunities based on individual merit. This topic addresses the impact of discrimination and practices related to diversity, inclusion, and equal opportunity.</i></p>	



**13 ASPEK TATA KELOLA (GOVERNANCE)**

Aspek ini mengedepankan pada tata kelola perusahaan, termasuk etika, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Perusahaan harus mengikuti kode etik yang ketat, mencegah konflik kepentingan, dan menghindari praktik-praktik yang meragukan secara etika. Transparansi harus dilakukan dalam pengambilan keputusan, pelaporan keuangan, dan struktur kepemilikan adalah hal yang penting dalam memastikan tata kelola yang baik. Berikut adalah pendekatan P-D-C-A dalam rangka meningkatkan keberlanjutan terhadap aspek tata kelola:

**1 Perencanaan (Plan)**

Tahap perencanaan dalam konteks tata kelola antara lain :

- a. Menyusun tata kelola terkait ESG
- b. Menyusun kebijakan dan/atau prosedur terkait ESG

**2 Pelaksanaan (Do)**

Tahap pelaksanaan dalam konteks tata kelola antara lain :

- a. Penyesuaian *Key Performance Indicator* (KPI) terkait ESG dan isu terkait perubahan iklim
- b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan
- c. Pelaksanaan program pengembangan kompetensi khusus untuk level board terkait perubahan iklim
- d. Implementasi kebijakan dan prosedur terkait ESG

**3 Permantauan dan Evaluasi (Check)**

Tahap pemantauan dan evaluasi dalam konteks tata kelola antara lain:

- a. Monitoring secara berkala implementasi tata kelola terkait ESG
- b. Evaluasi atas relevansi kebijakan dan prosedur terkait
- c. *Assessment* pencapaian ESG perusahaan

**4 Tindak Lanjut (Act)**

Tahap tindak lanjut dalam konteks tata kelola antara lain :

- a. Pemutakhiran kebijakan dan prosedur terkait ESG
- b. Identifikasi area perbaikan atas penerapan tata kelola ESG

**13 GOVERNANCE ASPECTS**

*This aspect prioritizes corporate governance, including ethics, transparency and accountability in decision making. Company must follow a strict code of ethics, prevent conflicts of interest, and avoid ethically questionable practices. Transparency must be implemented in decision making, financial reporting, and ownership structure is important in ensuring good governance. The following is the P-D-C-A approach in order to increase sustainability in aspects of governance:*

**1 Plan**

*The plan stages in the context of governance are to :*

- a. Develop governance related to ESG*
- b. Develop policies and/or procedures related to ESG*

**2 Do**

*The do stages in the context of governance are :*

- a. Adjustment of Key Performance Indicators (KPI) related to ESG and issues related to climate change*
- b. Increasing of company transparency and accountability*
- c. Implementation of special competency development programs for board level related to climate change*
- d. Implementation of ESG-related policies and procedures*

**3 Check**

*The check stages in the context of governance are to :*

- a. Regularly monitor the implementation of governance related to ESG*
- b. Evaluate the relevance of related policies and procedures*
- c. Assess the company ESG achievements*

**4 Act**


*The act stages in the context of governance are to :*


- a. Updating of policies and procedures related to ESG*
- b. Identification of areas for improvement in the implementation of ESG governance.*



Implementasi aspek Tata Kelola (*Governance*) di sektor pertambangan memiliki signifikansi yang besar dalam mengelola risiko, menjaga integritas, dan menciptakan nilai jangka panjang. Terdapat beberapa topik material dalam aspek *governance* yang perlu menjadi perhatian perusahaan sebagai berikut :

*Implementation of Governance aspect in the mining sector has great significance in managing risk, maintaining integrity and creating long-term value. There are several material topics in the governance aspect that need to be of concern to company :*

NO	TOPIK MATERIAL (TOPIC MATERIAL)	KETERANGAN (NOTE)	HARMONISASI ESG (HARMONIZATION ESG)
1	<p><b>Antikorupsi</b></p> <p><i>Anti Corruption</i></p>	<p>Antikorupsi merupakan cara organisasi mengelola potensi terlibatnya perilaku korupsi. Korupsi merupakan praktik seperti suap, pembayaran uang pelicin, penipuan, pemerasan, kolusi, pencucian uang, atau penawaran atau penerimaan bujukan untuk melakukan sesuatu yang tidak jujur atau melanggar hukum. Topik ini membahas dampak terkait dengan korupsi dan pendekatan organisasi terkait kontrak dan transparansi kepemilikan.</p> <p><i>Anti-corruption is an organization's way of managing the potential for involvement in corrupt behavior. Corruption is practices such as bribery, kickbacks, fraud, extortion, collusion, money laundering, or offering or accepting inducements to do something dishonest or unlawful. This topic discusses the impacts related to corruption and the organization's approach to contracts and ownership transparency.</i></p>	
2	<p><b>Pembayaran kepada pemerintah</b></p> <p><i>Pay to Government</i></p>	<p>Topik ini membahas dampak dari praktik organisasi terkait pembayaran kepada pemerintah dan pendekatan organisasi terhadap transparansi pembayaran tersebut.</p> <p><i>This topic discusses the impact of organizational practices regarding payments to government and the organization's approach to the transparency of those payments.</i></p>	

NO	TOPIK MATERIAL (TOPIC MATERIAL)	KETERANGAN (NOTE)	HARMONISASI ESG (HARMONIZATION ESG)
3	<p><b>Kebijakan public</b></p> <p><i>Public policy</i></p>	<p>Organisasi dapat berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan publik, secara langsung atau melalui organisasi perantara, dengan melalui lobi atau memberikan kontribusi keuangan atau natura kepada partai-partai politik, politisi, atau alasan-alasan politik. Meskipun organisasi dapat mendorong pengembangan kebijakan publik yang mendatangkan manfaat kepada masyarakat, partisipasinya juga dapat berkaitan dengan korupsi, suap, pengaruh yang tidak semestinya, atau perwakilan kepentingan organisasi yang tidak seimbang. Topik ini membahas pendekatan organisasi untuk dukungan kebijakan publik, dan dampak yang dapat dihasilkan dari pengaruh yang diberikan oleh organisasi.</p> <p><i>Organizations may participate in the development of public policy, directly or through intermediary organizations, by lobbying or making financial or in-kind contributions to political parties, politicians, or political causes. Although organizations can encourage the development of public policies that bring benefits to society, their participation may also be associated with corruption, bribery, undue influence, or disproportionate representation of organizational interests. This topic examines organizational approaches to public policy support, and the impact that an organization's influence can have.</i></p>	 

**14 KEMITRAAN MULTI PIHAK**

**14 MULTI-PARTY PARTNERSHIP**

Kemitraan multipihak menjadi kunci dalam akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan baik kemitraan global maupun aksi kolaborasi dengan pemangku kepentingan, investor, swasta, pemerintah, dan akademisi. PT Bukit Asam Tbk. dapat menjalin kemitraan multi pihak untuk menciptakan solusi yang holistik dalam mendukung implementasi ESG yang tentunya akan berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

*Multi-stakeholder partnerships are the key to accelerating the achievement of sustainable development goals, both global partnerships and collaborative actions with stakeholders, investors, the private sector, government and academics. PT Bukit Asam Tbk. can establish multi-party partnerships to create holistic solutions to support ESG implementation which will certainly have an impact on achieving sustainable development goals.*

Kemitraan dengan *UN Global Compact* (UNGC) merupakan salah satu cara bagi perusahaan dan organisasi untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. UNGC merupakan lembaga PBB yang mempunyai misi untuk mendukung berkelanjutan. UNGC merupakan lembaga PBB yang mempunyai misi untuk mendukung pencapaian SDGs sebagai kegiatan strategis. UNGC memberikan peluang kolaborasi multi pihak antara pemangku kepentingan PBB, dunia usaha, dan masyarakat. UNGC membantu perusahaan menemukan dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang mempunyai kepentingan bersama dalam mencapai praktik bisnis yang bertanggungjawab. Berikut adalah 10 prinsip UNGC:

- 1) Prinsip 1 - Prinsip 2: Hak Asasi Manusia
- 2) Prinsip 3 - Prinsip 6: Ketenagakerjaan
- 3) Prinsip 7 - Prinsip 9: Lingkungan
- 4) Prinsip 10: Anti-korupsi

Melalui kemitraan ini, perusahaan dapat terhubung dengan jaringan global dari berbagai sektor dan wilayah. Ini menciptakan peluang untuk berkolaborasi, bertukar informasi, dan belajar dari praktik-praktik terbaik dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, kemitraan multi pihak akan memberikan kemudahan akses perusahaan ke sumber daya dan pengetahuan terkait tanggung jawab sosial perusahaan dan praktik berkelanjutan dalam berbagai sektor.

## 15 MANAJEMEN RISIKO ESG

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023, Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BUMN, mencakup Sistem Pengendalian Intern, dan Tata Kelola Terintegrasi. Dalam penerapan manajemen risiko, perusahaan mengacu pada standar ISO 31000:2018 tentang Sistem Manajemen Risiko yang terdiri atas tiga elemen yaitu prinsip, kerangka kerja, dan proses.

Manajemen risiko dalam konteks ESG merupakan suatu pendekatan yang melibatkan identifikasi, penilaian, dan pengelolaan potensi risiko yang terkait dengan dampak lingkungan, aspek sosial, dan tata kelola perusahaan. Manajemen risiko ESG menuntut pengungkapan atas proses yang digunakan perusahaan untuk mengelola risiko dan peluang terkait keberlanjutan. Hal ini menjadi semakin penting karena tuntutan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap perusahaan untuk mengelola dampaknya terhadap planet, masyarakat, dan tata kelola bisnis yang baik. Penerapan manajemen risiko pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dijabarkan sebagai berikut:

*Partnership with the UN Global Compact (UNGC) is one way for companies and organizations to commit to responsible and sustainable business principles. UNGC is a UN agency whose mission is to support the achievement of SDGs as a strategic activity. UNGC provides opportunities for multi-party collaboration between UN stakeholders, the business world and society. UNGC helps companies find and collaborate with stakeholders who have a common interest in achieving responsible business practices. The following are the 10 UNGC principles:*

- 1) *Principle 1 - Principle 2: Human Rights*
- 2) *Principle 3 - Principle 6: Employment*
- 3) *Principle 7 - Principle 9: Environment*
- 4) *Principle 10: Anti-corruption*

*Through this partnership, company can connect with global networks from various sectors and regions. It creates opportunities to collaborate, exchange information and learn from best practices in sustainable development. Thus, multi-party partnerships will provide companies with easy access to resources and knowledge related to corporate social responsibility and sustainable practices in various sectors.*

## 15 ESG RISK MANAGEMENT

*Based on BUMN Ministerial Regulation Number PER-2/MBU/03/2023, Risk Management is a series of structured procedures and methodologies used to identify, measure, treat and monitor risks arising from all BUMN business activities, including the Internal Control System and Governance. Manage Integrated. In implementing risk management, the company refers to the ISO 31000:2018 standard concerning Risk Management Systems consisting of three elements, namely principles, framework and processes.*

*Risk management in the ESG context is an approach that involves identifying, assessing and managing the potential risks related to environmental impacts, social aspects and corporate governance. ESG risk management requires disclosure of the processes company uses to manage risks and opportunities related to sustainability. It is becoming increasingly important due to demands from stakeholders for companies to manage their impact on the planet, society and good business governance. The application of risk management in environmental, social and governance aspects is described as follows:*



**1 Lingkungan**

Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan dampak lingkungan dari kegiatan atau operasi suatu organisasi. Aspek yang menjadi perhatian salah satunya terkait perubahan iklim. Risiko iklim didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat perubahan iklim terhadap kehidupan, mata pencaharian, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya. Risiko iklim merujuk pada risiko transisi dan risiko fisik. Risiko transisi merupakan risiko yang muncul akibat perubahan arah kebijakan pemerintah dan stakeholder, kemajuan teknologi, dan dinamika sosial seiring dengan bergesernya perekonomian dunia ke arah ekonomi rendah karbon. Risiko fisik dapat digolongkan menjadi dua yaitu risiko yang disebabkan oleh bencana alam yang parah (risiko fisik akut) dan risiko yang secara bertahap terdampak oleh perubahan pola iklim dalam jangka panjang (risiko fisik kronis). Dalam mengelola risiko dan peluang terkait perubahan iklim, terdapat 4 (empat) aspek yang menjadi perhatian sesuai dengan *framework Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD)* yaitu tata kelola, strategi, manajemen risiko, metrik dan target.

**2 Sosial**

Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan kondisi sosial. Aspek-aspek yang umumnya diperhatikan adalah ketenagakerjaan, keselamatan kerja, demografi, perubahan pasar/konsumen, masyarakat, hak asasi manusia, dan para pemangku kepentingan.

**3 Tata kelola**

Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan tata kelola. Aspek-aspek yang umumnya diperhatikan adalah kebijakan, standar, prosedur, petunjuk teknis, instruksi kerja, dan dokumen kontrol.

**1 Environment**

*Identify, evaluate and manage risks related to the environmental impact of an organization's activities or operations. One aspect of concern is related to climate change. Climate risk is defined as the potential loss due to climate change on life, livelihoods, health, economy, social and culture. Climate risks refer to transition risks and physical risks. Transition risk is a risk that arises due to changes in the direction of government and stakeholder policies, technological advances and social dynamics as the world economy shifts towards a low-carbon economy. Physical risks can be classified into two, namely risks caused by severe natural disasters (acute physical risks) and risks that are gradually affected by long-term changes in climate patterns (chronic physical risks). In managing risks and opportunities related to climate change, there are 4 (four) aspects of concern in accordance with the Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) framework, namely governance, strategy, risk management, metrics and targets.*

**2 Social**

*Identify, evaluate and manage risks related to social conditions. Aspects that are generally considered are employment, work safety, demographics, market/consumer changes, society, human rights, and stakeholders.*

**3 Governance**

*Identify, evaluate and manage risks related to governance. Aspects that are generally considered are policies, standards, procedures, technical instructions, work instructions and control documents.*



**15.1** Manajemen Risiko ESG MIND ID  
(Mining Industry Indonesia)**15.1.1 Ekspektasi Kinerja**

Perusahaan diharapkan untuk menerapkan strategi dan sistem manajemen risiko yang efektif berdasarkan ilmu pengetahuan dan memperhitungkan persepsi pemangku kepentingan tentang risiko melalui:

- a. Perusahaan melakukan kajian mengenai risiko, peluang dan dampak lingkungan dan sosial di investasi/proyek baru maupun perubahan signifikan dalam fase operasi melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan yang terdampak serta memberikan informasi kepada publik terkait hasil kajian risiko; dan
- b. Perusahaan akan mengidentifikasi risiko melalui uji tuntas Hak Asasi Manusia (HAM) dan konflik yang sejalan dengan *the OECD Due Diligence Guidance on Conflict Affected and High-Risk Areas* khususnya di wilayah operasi yang rawan konflik maupun jika terdapat *supplier* dari daerah konflik untuk meminimalkan dampak HAM dalam rantai pasok perusahaan.

**15.1.2 Komitmen Management Risiko ESG**

- a. Perusahaan berkomitmen untuk mengelola risiko secara efektif sehingga dapat memberikan keyakinan kepada semua pemangku kepentingan.
- b. Perusahaan berkomitmen bahwa manajemen risiko merupakan bagian penting dari *core value* dan merupakan dasar untuk mencapai bisnis yang berkelanjutan serta mempunyai keunggulan kompetitif.
- c. Perusahaan berkomitmen untuk mengelola risiko lingkungan, sosial dan tata kelola secara proaktif dan efektif. Pengambilan keputusan di seluruh organisasi perusahaan akan berdasar pada risiko termasuk terkait ESG.
- d. Perusahaan berkomitmen bahwa tanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko terletak pada para pimpinan dan seluruh pegawai.
- e. Kebijakan ini dikomunikasikan dan menjadi tanggung jawab bersama setiap orang yang bekerja atas nama PERUSAHAAN dan/atau Perusahaan. Kebijakan ini juga didokumentasikan serta ditinjau secara periodik untuk memastikan bahwa kebijakan ini telah sesuai dengan sasaran dan upaya perbaikan secara berkelanjutan.

**15.1** Risk Management of MIND ID  
(Mining Industry Indonesia) ESG**15.1.1 Expectation Performance**

*Company is expected to implement effective risk management strategies and systems based on science and taking into account stakeholder perceptions of risk through:*

- a. The Company conducts studies regarding environmental and social risks, opportunities and impacts in new investments/projects as well as significant changes in the operational phase through consultation with the affected stakeholders and provides information to the public regarding the results of risk studies; and*
- b. The company will identify risks through Human Rights (HAM) and conflict due diligence in line with the OECD Due Diligence Guidance on Conflict Affected and High-Risk Areas, especially in conflict-prone operational areas and if there are suppliers from conflict areas to minimize the impact on human rights in company supply chain.*

**15.1.2 Risk Management Commitment of ESG**

- a. The Company is committed to managing risks effectively so as to provide confidence to all stakeholders.*
- b. The company is committed that risk management is an important part of its core values and is the basis for achieving a sustainable business and competitive advantage.*
- c. The Company is committed to managing environmental, social and governance risks proactively and effectively. Decision making throughout the company organization will be based on risks, including those related to ESG.*
- d. The Company is committed that the responsibility for identifying, evaluating and managing risks lies with the leadership and all employees.*
- e. This policy is communicated and is the collective responsibility of everyone who works on behalf of the COMPANY and/or the Company. This policy is also documented and reviewed periodically to ensure that this policy is in accordance with targets and continuous improvement efforts.*

### 15.1.3 Pendekatan Management Risiko ESG

- a. Melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap risiko ESG untuk mencapai tujuan bisnis dan kelancaran operasi pertambangan
- b. Melakukan komunikasi yang efektif terkait risiko ESG kepada para pimpinan dan pembuat kebijakan perusahaan.
- c. Menanamkan *risk awareness* di dalam proses pembuatan keputusan untuk mendukung para pemimpin perusahaan dalam mengelola risiko secara proaktif dan efektif yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan serta menjaga *core value*.

### 15.1.4 Organisasi Pendekatan Mangemen Risiko ESG

- a. Dalam Manajemen Risiko ESG dibentuk Komite ESG dan Tim Kerja ESG yang tugasnya untuk meningkatkan kinerja ESG mengacu pada ISO 26000 mengenai Social Responsibility, Prinsip-prinsip penambangan International Council on Mining and Metals (ICMM), Indikator ESG Risk Rating, standar laporan keberlanjutan Global Reporting Initiative serta regulasi dan standar lainnya yang berlaku, termasuk pelaksanaan dari pedoman strategis, kebijakan pelaksana dan praktik-praktik penerapan keberlanjutan terbaik (*Best Practices*) di PERUSAHAAN dan Anggota PERUSAHAAN.
- b. Untuk mengkoordinir pelaksanaan program/inisiatif ESG dibentuk Unit/Biro ESG di PERUSAHAAN

### 15.1.3 Risk Management Approach of ESG

- a. *Identifying and evaluate ESG risks to achieve business goals and smooth mining operations*
- b. *Carrying out effective communication regarding ESG risks to company leaders and policy makers.*
- c. *Embedding risk awareness in the decision-making process to support company leaders in managing risk proactively and effectively which can improve company performance and maintain core values.*

### 15.1.4 Organization of ESG Risk Management Approach

- a. *In ESG Risk Management, an ESG Committee and ESG Working Team were formed whose task is to improve ESG performance referring to ISO 26000 regarding Social Responsibility, International Council on Mining and Metals (ICMM) mining principles, ESG Risk Rating Indicators, Global Reporting Initiative sustainability reporting standards as well as other applicable regulations and standards, including the implementation of strategic guidelines, implementing policies and best sustainability practices (Best Practices) in the COMPANY and COMPANY Members.*
- b. *To coordinate the implementation of ESG programs/initiatives, an ESG Unit/Bureau was formed at the COMPANY*



## 16 PELAPORAN ESG

Pelaporan ESG merupakan proses di mana perusahaan secara terperinci menjelaskan kinerjanya terkait faktor lingkungan (*Environment*), seperti upaya perlindungan lingkungan, pengelolaan limbah, dan pengurangan emisi. Selain itu, aspek sosial (*Social*) mencakup informasi tentang dampak perusahaan terhadap karyawan, komunitas, dan hubungan dengan para pemangku kepentingan, termasuk kebijakan kesetaraan, keselamatan kerja, dan kontribusi pada masyarakat. Pada sisi tata kelola (*Governance*), pelaporan ini mencakup informasi tentang struktur manajemen, transparansi, kepatuhan, serta praktik tata kelola yang baik yang diterapkan oleh perusahaan, seperti komposisi dewan direksi, kebijakan anti-korupsi, dan mekanisme pengendalian internal.

Pelaporan ESG atau *ESG disclosure* ini bertujuan memenuhi kebutuhan pengungkapan capaian ESG Perusahaan sesuai kriteria yang ditetapkan oleh ICMM, SASB, IFRS, TCFD *framework* serta persyaratan regulasi terkait. Tujuannya adalah memberikan informasi transparan kepada pemangku kepentingan tentang bagaimana perusahaan mengelola aspek non-keuangan dalam operasinya, dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan perusahaan, situs web perusahaan, atau platform khusus untuk pelaporan ESG.

### 16.1 The International Council on Mining and Metals (ICMM)

The International Council on Mining and Metals (ICMM) menyediakan suatu kerangka kerja pelaporan yang dikenal sebagai *ICMM Reporting Framework*. *Framework* ini dirancang khusus untuk perusahaan pertambangan dan logam untuk menyajikan informasi terkait dengan praktik berkelanjutan, tata kelola, dan dampak sosial-lingkungan dari kegiatan mereka. Prinsip-Prinsip Pertambangan ICMM menguraikan persyaratan praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik bagi anggota perusahaan melalui serangkaian 39 Indikator dan 10 prinsip yang menyeluruh mengenai sejumlah tantangan kritis dalam industri.

- 1) *Ethical Business*
- 2) *Decision Making*
- 3) *Human Right*
- 4) *Risk Management*
- 5) *Health and Safety*
- 6) *Environmental Performance*
- 7) *Conservation of Biodiversity*
- 8) *Responsible Production*
- 9) *Social Performance*
- 10) *Stakeholder Engagement*

## 16 ESG REPORTING

*ESG reporting* is a process in which a company explains in detail its performance regarding environmental factors, such as environmental protection efforts, waste management and emission reduction. In addition, the social aspect (*Social*) includes information about the company's impact on employees, communities, and relationships with stakeholders, including equality policies, work safety, and contributions to society. On the governance side, this reporting includes information about management structure, transparency, compliance, and good governance practices implemented by the company, such as the composition of the board of directors, anti-corruption policies, and internal control mechanisms.

*This ESG reporting or ESG disclosure aims at fulfilling the need for disclosure of the Company's ESG achievements in accordance with the criteria set by ICMM, SASB, IFRS, TCFD framework and related regulatory requirements. The aim is to provide stakeholders with transparent information about how a company manages the non-financial aspects of its operations, with information disclosed in company reports, company websites or dedicated platforms for ESG reporting.*

### 16.1 The International Council on Mining and Metals (ICMM)

The International Council on Mining and Metals (ICMM) provides a reporting framework known as the *ICMM Reporting Framework*. This framework is specifically designed for mining and metals companies to present information related to sustainable practices, governance and the socio-environmental impact of their activities. The *ICMM Mining Principles* outline good environmental, social and governance practice requirements for member companies through a comprehensive set of 39 Indicators and 10 principles addressing a number of critical challenges in the industry.

- 1) *Ethical Business*
- 2) *Decision Making*
- 3) *Human Right*
- 4) *Risk Management*
- 5) *Health and Safety*
- 6) *Environmental Performance*
- 7) *Conservation of Biodiversity*
- 8) *Responsible Production*
- 9) *Social Performance*
- 10) *Stakeholder Engagement*

**16.2 Sustainability Accounting Standard Board (SASB)**

*Sustainability Accounting Standards Board (SASB)* adalah organisasi independen yang mengembangkan standar akuntansi berkelanjutan untuk membantu perusahaan melaporkan kinerja mereka dalam hal faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG). Berikut ini merupakan standar SASB dalam sistem pelaporan dan publikasi:

**1 Impact Materiality**

Pelaporan ini mencakup dampak kinerja perusahaan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang tidak tergambarkan dalam *enterprise value*.

**2 Standard SASB**

Standard SASB termasuk dalam kategori *financial materiality*. Dalam konteks keberlanjutan *financial materiality* merepresentasikan faktor keberlanjutan yang esensial terhadap *enterprise value* jangka pendek, menengah, dan panjang.

**3 Financial Reporting**

Merupakan pelaporan yang bersifat lebih spesifik dibandingkan standar SASB. Pelaporan keuangan ini merepresentasikan aspek keuangan perusahaan dalam bentuk asumsi dan proyeksi arus kas yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan

**16.3 International Financial Reporting Standards (IFRS)**

*International Financial Accounting Standard (IFRS)* merupakan standar pelaporan akuntansi yang diakui secara internasional yang diterbitkan oleh IASB (*International Accounting Standards Board*), yang merupakan organisasi akuntansi internasional. IFRS berguna untuk menciptakan bahasa akuntansi umum, agar terdapat keseragaman penyajian pelaporan bisnis dan keuangan pada seluruh perusahaan. Dalam era ketidakpastian lingkungan dan tuntutan yang semakin meningkat terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, langkah menuju transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keberlanjutan semakin menjadi perhatian.

**16.2 Sustainability Accounting Standard Board (SASB)**

*The Sustainability Accounting Standards Board (SASB) is an independent organization that develops sustainability accounting standards to help company report the performance in terms of environmental, social and corporate governance (ESG) factors. The following are SASB standards in reporting and publication systems:*

**1 Impact Materiality**

*This reporting covers the impact of company performance on environmental, social and economic aspects that are not reflected in enterprise value.*

**2 Standard SASB**

*SASB standards are included in the financial materiality category. In the context of sustainability, financial materiality represents an essential sustainability factor for short, medium and long term enterprise value.*

**3 Financial Reporting**

*It is reporting that is more specific than SASB standards. This financial reporting represents the company's financial aspects in the form of assumptions and cash flow projections that can be used in decision making to improve the company's financial performance*

**16.3 International Financial Reporting Standards (IFRS)**

*International Financial Accounting Standard (IFRS) is an internationally recognized accounting reporting standard published by the IASB (International Accounting Standards Board), which is an international accounting organization. IFRS is useful for creating a common accounting language, so that there is uniform presentation of business and financial reporting across companies. In an era of environmental uncertainty and increasing demands for corporate social responsibility, steps towards transparency and accountability in sustainability reporting are increasingly becoming a concern.*

Dalam upaya untuk mengatasi tantangan keberlanjutan, *International Sustainability Standards Board (ISSB)* telah merilis standar baru yang akan mengubah cara perusahaan melaporkan kinerja mereka dalam hal keberlanjutan yaitu *IFRS S1* dan *IFRS S2*. *IFRS S1* memberikan panduan bagi perusahaan dalam menyusun Pelaporan Bisnis Berkelanjutan yang mencakup aspek-aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perusahaan mengelola risiko dan peluang yang terkait dengan keberlanjutan. Sementara itu, *IFRS S2* berkaitan dengan Pelaporan Keuangan Berkelanjutan, diharapkan dapat mengungkapkan dampak finansial dari aspek-aspek keberlanjutan, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang hubungan antara keberlanjutan dan kinerja finansial.

*In an effort to address sustainability challenges, the International Sustainability Standards Board (ISSB) has released new standards that will change the way companies report their performance in terms of sustainability namely IFRS S1 and IFRS S2. IFRS S1 provides guidance for companies in preparing Sustainable Business Reporting which covers social, environmental and corporate governance aspects. It will provide a better understanding of how companies manage risks and opportunities related to sustainability. Meanwhile, IFRS S2 relates to Sustainable Financial Reporting, which is expected to reveal the financial impact of sustainability aspects, providing deeper insight into the relationship between sustainability and financial performance.*

**16.4 International Financial Reporting Standards (IFRS)**

*Reporting framework TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) memberikan kerangka kerja yang terfokus pada mengungkapkan informasi terkait dampak perubahan iklim pada aspek keuangan suatu perusahaan. TCFD diciptakan untuk membantu perusahaan dan organisasi dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko dan peluang finansial yang timbul dari perubahan iklim.*

**16.4 Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)**

*Reporting framework TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) provides a framework focused on disclosing information related to the impact of climate change on the financial aspects of a company. TCFD was created to help companies and organizations identify, measure and manage financial risks and opportunities arising from climate change.*

**Tata Kelola**

Tata kelola Organisasi seputar risiko dan peluang terkait perubahan iklim

**Strategi**

Dampak aktual dan potensi risiko dan peluang terkait perubahan iklim pada bisnis, strategi, dan perencanaan keuangan organisasi

**Manajemen**

Risiko Proses yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko terkait perubahan iklim

**Metrik dan Target**

Metrik dan target yang digunakan untuk menilai dan mengelola risiko dan peluang terkait perubahan iklim yang relevan.

**Governance**

Organizational governance around risks and opportunities related to climate change

**Strategy**

The actual and potential impact of climate change-related risks and opportunities on an organization's business, strategy, and financial planning

**Risk management**

The process used by organizations to identify, assess and manage risks related to climate change

**Metrics and Targets**

Metrics and targets used to assess and manage relevant climate change related risks and opportunities



Gambar 1. Elemen inti pengungkapan keuangan terkait perubahan iklim yang direkomendasikan Sumber: TCFD, 2021

Figure 1. Core elements of recommended climate change-related financial disclosures Source: TCFD, 2021



Kerangka kerja TCFD terdiri dari empat pilar utama, yaitu:

### 1 Tata Kelola

Perusahaan mengungkapkan tata kelola organisasi yang berkaitan dengan risiko dan peluang yang muncul akibat perubahan iklim.

### 2 Strategi

Perusahaan menyajikan informasi terperinci mengenai strategi mereka terkait perubahan iklim, termasuk skenario-skenario yang mereka pertimbangkan. Ini mencakup dampak perubahan iklim pada model bisnis, operasional, dan nilai aset.

### 3 Risiko

TCFD menekankan pada pengungkapan risiko finansial yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Perusahaan diminta untuk mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja finansial mereka dan langkah-langkah yang diambil untuk mengelolanya.

### 4 Metrik dan Target

TCFD menyarankan perusahaan untuk mengungkapkan metrik dan target terkait perubahan iklim yang dapat diukur dan diverifikasi. Ini dapat mencakup emisi gas rumah kaca, penggunaan energi terbarukan, atau proyek-proyek berkelanjutan lainnya.

## 16.5 Carbon Disclosure Project (CDP)

CDP adalah badan amal nirlaba yang menyediakan sistem pengungkapan global bagi investor untuk mengungkapkan aspek lingkungan dan perubahan iklim. CDP menyediakan platform bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi mengenai risiko dan dampak lingkungan mereka dan tindakan yang diambil untuk mengelolanya. Berikut adalah pengungkapan CDP terkait dengan tiga isu utama: perubahan iklim, keamanan air, dan hutan.

*The TCFD framework consists of four main pillars, namely:*

### 1 Governance

*The company discloses organizational governance related to risks and opportunities arising from climate change.*

### 2 Planning

*The Company presents detailed information about their strategies regarding climate change, including the scenarios it is considering. It includes the impact of climate change on business models, operations and asset values.*

### 3 Risk

*TCFD emphasizes disclosing financial risks resulting from climate change. Company is asked to identify risks that may affect their financial performance and the steps taken to manage them.*

### 4 Metrics and Targets

*TCFD advises company to disclose measurable and verifiable climate change-related metrics and targets. It could include greenhouse gas emissions, use of renewable energy, or other sustainable projects.*

## 16.5 Carbon Disclosure Project (CDP)

*CDP is a non-profit charity that provides a global disclosure system for investors to disclose aspects of the environment and climate change. CDP provides a platform for company to disclose information regarding the environmental risks and impacts and the actions taken to manage them. The following are CDP disclosures related to three main issues: climate change, water security, and forests.*

### 1) Perubahan iklim (*climate change*)

Program perubahan iklim CDP bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca perusahaan dan memitigasi risiko perubahan iklim. CDP mengumpulkan informasi mengenai risiko iklim dan peluang rendah karbon dari perusahaan-perusahaan terbesar di dunia. CDP meminta perusahaan untuk mengungkapkan emisi gas rumah kaca mereka dan strategi untuk menguranginya. Informasi tentang upaya perusahaan untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, seperti peningkatan suhu, cuaca ekstrem, dan perubahan pola hujan.

### 2) Ketahanan air (*water security*)

Program ini mendorong perusahaan untuk mengungkapkan dan mengurangi dampak lingkungannya dengan menggunakan kekuatan investor dan perusahaan.

### 3) Hutan (*forest*)

CDP mengumpulkan informasi dampak aktivitas perusahaan terhadap hutan, seperti deforestasi dan informasi mengenai empat komoditas pertanian yang menyebabkan sebagian besar deforestasi: kayu, kelapa sawit, sapi, dan kedelai. Program hutan CDP ini memberikan informasi atas tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk mengurangi dampak mereka terhadap hutan atau untuk mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan hutan.

Perusahaan dapat merespons CDP dengan mengisi kuesioner tahunan yang mencakup pertanyaan tentang aspek-aspek tersebut yang selanjutnya akan dinilai oleh CDP. Pengungkapan ini memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan menyadari dan mengatasi dampak lingkungan mereka. Perusahaan yang secara transparan dan proaktif mengungkapkan informasi terkait dengan perubahan iklim, keamanan air, dan hutan dapat meningkatkan citra mereka di mata pemangku kepentingan, termasuk investor, konsumen, dan regulator. Selain itu, dengan meningkatnya kesadaran akan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pengungkapan CDP menjadi semakin penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang.

### 1) *Climate Change*

*CDP's climate change program aims at reducing corporate greenhouse gas emissions and mitigate climate change risks. CDP collects information on climate risks and low-carbon opportunities from the world's largest companies. CDP asks companies to disclose their greenhouse gas emissions and strategies for reducing them. Information about the company's efforts to adapt to the impacts of climate change, such as increasing temperatures, extreme weather and changing rain patterns.*

### 2) *Water Security*

*This program encourages company to disclose and reduce the environmental impact using the power of investors and companies.*

### 3) *Forests*

*CDP collects information on the impact of company activities on forests, such as deforestation and information on the four agricultural commodities that cause the majority of deforestation: wood, palm oil, cattle and soybeans. CDP's forest program provides information on actions taken by companies to reduce their impact on forests or to support forest sustainability principles.*

*Companies can respond to CDP by filling out an annual questionnaire that includes questions on these aspects which will then be assessed by CDP. These disclosures provide an overview of the extent to which companies are aware of and addressing their environmental impacts. Companies that transparently and proactively disclose information related to climate change, water security and forests can improve their image in the eyes of stakeholders, including investors, consumers and regulators. In addition, with the increasing awareness of social and environmental responsibility, CDP disclosures are becoming increasingly important in companies' efforts to achieve long-term sustainability.*

**16.6 Morgan Stanley Capital International (MSCI)**

**16.6 Morgan Stanley Capital International (MSCI)**

MSCI merupakan perusahaan yang menyediakan alat dan layanan pendukung keputusan penting bagi komunitas investasi global termasuk pemeringkatan ESG. Pemeringkatan ESG bertujuan untuk mengukur ketahanan perusahaan dan pengelolaan risiko serta peluang yang relevan terhadap keberlanjutan. Pilar pemeringkatan ESG indeks menurut MSCI ditunjukkan pada gambar berikut:

MSCI is a company that provides critical decision support tools and services to the global investment community including ESG ratings. ESG rankings aim at measuring a company's resilience and manage risks and opportunities relevant to sustainability. The ESG index ranking pillars, according to MSCI, are shown in the following figure:

MSCI ESG Score									
Environment Pillar				Social Pillar				Governance Pillar	
Climate Change	Natural Capital	Pollution & Waste	Env. Opportunities	Human Capital	Product Liability	Stakeholder Opposition	Social Opportunities	Corporate Governance	Corporate Behavior
Carbon Emissions	Water Stress	Toxic Emissions & Waste	Clean Tech	Labor Management	Product Safety & Quality	Controversial Sourcing	Access to Communication	Board	Business Ethics
Product Carbon Footprint	Biodiversity & Land Use	Packaging Material & Waste	Green Building	Health & Safety	Chemical Safety	Community Relations	Access to Finance	Pay	Tax Transparency
Financing Environmental Impact	Raw Material Sourcing	Electronic Waste	Renewable Energy	Human Capital Development	Consumer Financial Protection		Access to Health Care	Ownership	
Climate Change Vulnerability				Supply Chain Labor Standards	Privacy & Data Security		Opportunities in Nutrition & Health	Accounting	
					Responsible Investment				
					Insuring Health & Demographic Risk				

● Key Issues selected for the Soft Drinks Sub Industry (e.g. Coca Cola)
 ● Universal Key Issues applicable to all industries

**16.7 International Financial Corporation (IFC)**

**16.7 International Financial Corporation (IFC)**

IFC performance standards merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan oleh IFC yang merupakan bagian dari Grup Bank Dunia yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatannya memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Meskipun IFC performance standards tidak bersifat mengikat secara hukum, banyak perusahaan di berbagai sektor, termasuk sektor batubara, mengadopsi kerangka kerja ini sebagai panduan untuk praktik bisnis yang berkelanjutan. Kerangka keberlanjutan ini terdiri dari kebijakan dan standar kinerja terkait keberlanjutan dan sosial IFC serta kebijakan terhadap akses informasi. Standar Kinerja ini mencakup sejumlah prinsip dan kriteria keberlanjutan yang mencakup aspek-aspek seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan tata kelola perusahaan. Berikut ini merupakan panduan pengungkapan ESG berdasarkan IFC performance standards:

IFC performance standards are a framework used by IFC which is part of the World Bank Group whose aim is to ensure that its activities have a positive impact on economic, social and environmental sustainability. Although IFC performance standards are not legally binding, many companies in various sectors, including the coal sector, are adopting this framework as a guide for sustainable business practices. This sustainability framework consists of IFC sustainability and social policies and performance standards as well as policies on access to information. These Performance Standards include a number of sustainability principles and criteria covering aspects such as human rights, the environment and corporate governance. The following is a guide to ESG disclosure based on IFC performance standards:



## 1) Pengungkapan Aspek Lingkungan (*Disclosure of Environmental Aspects*)

No	Topik ( <i>Topic</i> )	Deskripsi ( <i>Description</i> )
1.	<b>Perubahan Iklim</b> <i>Climate Change</i>	<b>Mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengambil langkah adaptasi terhadap dampak perubahan iklim</b> <i>Reducing the greenhouse gas emissions and taking steps to adapt to the impacts of climate change</i>
2.	<b>Manajemen Karbon</b> <i>Carbon Management</i>	<b>Menetapkan dan menjalankan target pengurangan emisi dan berinovasi untuk mengurangi emisi karbon operasional perusahaan</b> <i>Setting and implementing the emission reduction targets and innovating to reduce the company's operational carbon emissions</i>
3.	<b>Penipisan Sumber Daya</b> <i>Resource Depletion</i>	<b>Mengurangi penggunaan dan meningkatkan efisiensi sumber daya</b> <i>Reducing the usage and increasing the resource efficiency</i>
4.	<b>Polusi</b> <i>Pollution</i>	<b>Mengurangi dan menghindari pencemaran polusi terhadap lingkungan sekitar</b> <i>Reducing and avoiding the pollution to the surrounding environment</i>
5.	<b>Konsumsi Energi</b> <i>Energy Consumption</i>	<b>Meningkatkan efisiensi dan mengurangi penggunaan energi</b> <i>Increasing the efficiency and reducing the energy use</i>
6.	<b>Penggunaan Lahan</b> <i>Land Use</i>	<b>Menggunakan lahan secara efisien dan menghindari penggunaan lahan yang baru</b> <i>Using the land efficiently and avoiding the new land uses</i>
7.	<b>Hilangnya Keanekaragaman Hayati</b> <i>Loss of Biodiversity</i>	<b>Melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati</b> <i>Protecting and preserving the biodiversity</i>
8.	<b>Konsumsi Air</b> <i>Water Consumption</i>	<b>Meningkatkan efisiensi dan mengurangi penggunaan air</b> <i>Increasing the efficiency and reducing the water usage</i>
9.	<b>Pengelolaan Sampah</b> <i>Waste Management</i>	<b>Mengurangi sampah yang diproduksi dan meningkatkan daur ulang</b> <i>Reducing the waste produced and increasing the recycling</i>
10.	<b>Inovasi/ Produk/ Layanan yang Mengurangi Dampak Lingkungan</b> <i>Innovation/Product/Service that Reduces Environmental Impact</i>	<b>Mengembangkan dan menerapkan teknologi berkelanjutan, desain ramah lingkungan dan proses hemat sumber daya</b> <i>Developing and implementing the sustainable technologies, eco-friendly designs and resource-saving processes</i>

## 2) Pengungkapan Aspek Sosial (*Disclosure of Social Aspects*)

No	Topik ( <i>Topic</i> )	Deskripsi ( <i>Description</i> )
1.	<b>Penciptaan Lapangan Kerja dan Kondisi Kerja</b> <i>Human Settlements and Working Conditions</i>	<b>Menciptakan lapangan kerja dan memastikan kondisi kerja yang layak</b> <i>Creating many jobs and ensuring the decent working conditions</i>

2.	<p><b>Kesempatan yang Sama</b> <i>Equal Opportunities</i></p>	<p><b>Memiliki kebijakan dan program yang menjamin kesetaraan kesempatan kerja</b> <i>Having policies and programs that guarantee equal employment opportunities</i></p>
3.	<p><b>Keberagaman</b> <i>Diversity</i></p>	<p><b>Memiliki kebijakan dan program yang menghormati dan menjamin keberagaman</b> <i>Having policies and programs that respect and ensure diversity</i></p>
4.	<p><b>Pelatihan</b> <i>Training</i></p>	<p><b>Memiliki perencanaan dan program pelatihan rutin untuk meningkatkan kapasitas (pengetahuan dan keahlian) karyawan</b> <i>Having regular planning and training programs to increase employee capacity (knowledge and skills).</i></p>
5.	<p><b>Dampak terhadap Masyarakat Lokal</b> <i>Impact on Local Communities</i></p>	<p><b>Memiliki program yang berdampak positif secara berkelanjutan bagi masyarakat local</b> <i>Having programs that have a sustainable positive impact on local communities</i></p>
6.	<p><b>Kesehatan dan Keselamatan Kerja</b> <i>Occupational Health and Safety</i></p>	<p><b>Menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan</b> <i>Ensuring the employee health and safety</i></p>
7.	<p><b>Pekerja Anak dan Pekerja Paksa</b> <i>Child Labor and Forced Labor</i></p>	<p><b>Memiliki kebijakan untuk memastikan tidak adanya pekerja anak atau praktik kerja paksa dalam seluruh rantai pasokan</b> <i>Having policies in place to ensure that there is no child labor or forced labor practices throughout the supply chain</i></p>
8.	<p><b>Mekanisme Pengaduan</b> <i>Complaint Mechanism</i></p>	<p><b>Memiliki sistem untuk menyampaikan keluhan yang dapat diakses dan terjamin kerahasiaannya, serta tindak lanjut yang memadai</b> <i>Having a system for submitting complaints that can be accessed and ensure confidentiality, as well as adequate follow-up</i></p>
9.	<p><b>Hak Asasi Manusia</b> <i>Human Rights</i></p>	<p><b>Menghargai hak asasi manusia seluruh pihak yang terlibat dalam operasi bisnis</b> <i>Respecting the human rights of all parties involved in business operations</i></p>
10.	<p><b>Dampak Sosial Produk/ Layanan/ Operasi</b> <i>Social Impact of Products/ Services/ Operations</i></p>	<p><b>Memastikan seluruh produk, layanan, dan operasi bisnis memberikan dampak yang baik bagi Masyarakat</b> <i>Ensuring that all products, services and business operations have a good impact on society</i></p>
11.	<p><b>Kekerasan dan Pelecehan Berbasis Gender</b> <i>Gender-Based Violence and Harassment</i></p>	<p><b>Memastikan tidak adanya kekerasan dan pelecehan berbasis gender serta membangun budaya perusahaan yang aman dari hal tersebut</b> <i>Ensuring the absence of gender-based violence and harassment and building a company culture that is safe from it.</i></p>

### 3) Pengungkapan Aspek Tata Kelola (*Disclosure of Governance Aspects*)

No	Topik ( <i>Topic</i> )	Deskripsi ( <i>Description</i> )
1.	<b>Tujuan, Nilai, dan Budaya</b> <i>Goals, Values, and Culture</i>	<b>Menciptakan tujuan, nilai, dan budaya kerja yang positif serta bermanfaat untuk semua pemangku kepentingan</b> <i>Creating goals, values and a positive and beneficial work culture for all stakeholders</i>
2.	<b>Keanekaragaman dewan, struktur, dan pengawasan</b> <i>Board diversity, structure and oversight</i>	<b>Memiliki kebijakan dan program yang memastikan keberagaman dewan, struktur yang baik, dan pengawasan yang memadai</b> <i>Having policies and programs that ensure board diversity, good structure, and adequate oversight</i>
3.	<b>Perencanaan Suksesi</b> <i>Succession Planning</i>	<b>Memiliki kebijakan dan program yang menjamin dan memastikan kelangsungan operasional dan pertumbuhan berkelanjutan</b> <i>Having policies and programs that guarantee and ensure operational continuity and sustainable growth</i>
4.	<b>Gaji Eksekutif</b> <i>Executive Salaries</i>	<b>Memastikan gaji yang wajar dan pelaporan yang transparan</b> <i>Ensuring the fair salaries and transparent reporting</i>
5.	<b>Kontrol Internal</b> <i>Internal Control</i>	<b>Membuat sistem kontrol internal untuk memastikan tata kelola organisasi yang baik</b> <i>Creating an internal control system to ensure good organizational governance</i>
6.	<b>Tata Kelola Risiko</b> <i>Risk Management</i>	<b>Melaksanakan asesmen risiko dan menyusun rencana mitigasinya</b> <i>Carrying out risk assessments and developing mitigation plans</i>
7.	<b>Etika dan kepatuhan</b> <i>Ethics and compliance</i>	<b>Memastikan operasional organisasi berjalan sesuai dengan kode etik dan norma kepatuhan yang berlaku</b> <i>Ensuring that organizational operations run in accordance with the applicable code of ethics and compliance norms</i>
8.	<b>Hak Pemegang Saham</b> <i>Shareholder's Rights</i>	<b>Menghormati hak pemegang saham dan perlakuan yang setara</b> <i>Respecting the shareholder's rights and treating him/her equally</i>
9.	<b>Tata Kelola Keterlibatan Pemangku Kepentingan</b> <i>Management of Stakeholder's Engagement</i>	<b>Melibatkan dan menghormati pemangku kepentingan untuk tujuan Bersama</b> <i>Engaging and respecting the stakeholder for shared goals</i>
10.	<b>Pengungkapan dan transparansi</b> <i>Disclosure and transparency</i>	<b>Memastikan pengungkapan dilakukan secara transparan</b> <i>Ensuring that the disclosure is carried out transparently</i>



## 16.8 Laporan Keberlanjutan

## 16.8 Sustainability Report

### 1 Prinsip Utama :

- i. Penulisan Laporan Keberlanjutan merupakan upaya mengungkap strategi, inisiatif maupun kinerja keberlanjutan dalam periode pelaporan kepada publik dalam rangka menciptakan reputasi positif dari *stakeholder* terhadap PT Bukit Asam Tbk.
- ii. Laporan Keberlanjutan memuat informasi/data sesuai dengan kerangka strategis keberlanjutan yang diadopsi oleh PT Bukit Asam Tbk, yakni MIND ID *Sustainability Pathway* yang terdiri dari 6 (enam) pilar keberlanjutan dan 27 (dua puluh tujuh) area ESG.
- iii. Perusahaan dapat mengidentifikasi, mengukur dan mengungkapkan dampak keberlanjutan yang dihasilkan, menunjukkan komitmen dalam mengintegrasikan praktik-praktik keberlanjutan dalam kegiatan usahanya dan menyajikan informasi yang relevan bagi *stakeholder* melalui Laporan Keberlanjutan.

### 2 Standar Laporan Keberlanjutan :

- i. Laporan Keberlanjutan memuat kinerja keberlanjutan yang terdiri dari kinerja lingkungan, kinerja sosial dan kinerja ekonomi pada periode pelaporan.
- ii. Acuan utama dalam penyusunan Laporan Keberlanjutan adalah Standar GRI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang, kebijakan dan standar yang berlaku.
- iii. Regulasi utama yang relevan (termasuk setiap perubahan atau peraturan pengganti) terkait dengan Pedoman ini pada saat diterbitkan adalah antara lain :
  - a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik;

### 1 Main Principles :

- i. *The Sustainability Report is an effort to reveal sustainability strategies, initiatives and performance in the reporting period to the public in order to create a positive reputation from stakeholders for PT Bukit Asam Tbk.*
- ii. *The Sustainability Report contains information/data in accordance with the strategic sustainability framework adopted by PT Bukit Asam Tbk, namely the Sustainability Pathway which consists of 6 (six) sustainability pillars and 27 (twenty seven) ESG areas.*
- iii. *Companies can identify, measure and disclose the resulting sustainability impacts, demonstrate commitment to integrating sustainable practices in their business activities and present relevant information to stakeholders through Sustainability Reports.*

### 2 Sustainability Report Standard :

- i. *The Sustainability Report contains sustainability performance consisting of environmental performance, social performance and economic performance in the reporting period.*
- ii. *The main reference in preparing the Sustainability Report is the GRI Standards and Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies, while still paying attention to applicable laws, policies and standards.*
- iii. *The main relevant regulations (including any amendments or replacement regulations) relating to this Guide at the time of publication include :*
  - a. *Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number 1 of 2021 concerning the Company Performance Rating Assessment Program in Environmental Management;*
  - b. *Minister of Energy and Mineral Resources Decree Number 1827 K/30/MEM/2018 concerning Guidelines for Implementing Good Mining Principles;*

Adapun standar-standar lainnya tersebut antara lain adalah :

- Global Reporting Initiatives (GRI): Universal Standard
- Global Reporting Initiatives (GRI): Sector Standard (GRI 12 Coal Standard dan/atau GRI 14 Mining and Metals Standard)
- International Council on Mining and Metals (ICMM)
- Aluminium Stewardship Initiative (ASI)
- United Nation Global Compact (UNGC)
- Sustainability Accounting Standard Board (SASB) : Metals and Mining and Coal Operations
- Sustainable Development Goals (SDGs)
- Morgan Stanley Capital International (MSCI) Index
- Sustainalytics' Company ESG Risk Rating
- Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
- Responsible Minerals Initiative (RMI)
- International Financial Accounting Standard (IFRS 1&2)

Selaras dengan kerangka strategis keberlanjutan yang diadopsi oleh PT Bukit Asam Tbk, *Sustainability Pathway* digunakan juga digunakan sebagai kerangka utama Laporan Keberlanjutan Perusahaan. Selanjutnya, untuk dapat menganalisis, memantau dan mengevaluasi kinerja keberlanjutan secara periodik, seluruh anggota MIND ID menggunakan *SuperApps - Sustainability*. Pengumpulan, analisa, reuiu dan pelaporan data kinerja keberlanjutan diperbarui secara berkala oleh Perusahaan. Data kinerja keberlanjutan disusun dalam 3 level, yaitu level unit, korporat, dan level MIND ID.

Pengelolaan data kinerja keberlanjutan secara berkala melalui *SuperApps - Sustainability* dan Laporan Keberlanjutan, memuat pilar-pilar keberlanjutan dan area ESG, sebagai berikut :

*These other standards include :*

- *Global Reporting Initiatives (GRI) : Universal Standard*
- *Global Reporting Initiatives (GRI): Sector Standard (GRI 12 Coal Standard dan/atau GRI 14 Mining and Metals Standard)*
- *International Council on Mining and Metals (ICMM)*
- *Aluminium Stewardship Initiative (ASI)*
- *United Nation Global Compact (UNGC)*
- *Sustainability Accounting Standard Board (SASB) : Metals and Mining and Coal Operations*
- *Sustainable Development Goals (SDGs)*
- *Morgan Stanley Capital International (MSCI) Index*
- *Sustainalytics' Company ESG Risk Rating*
- *Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)*
- *Responsible Minerals Initiative (RMI)*
- *International Financial Accounting Standard (IFRS 1&2)*

*In line with the strategic sustainability framework adopted by PT Bukit Asam Tbk, the Sustainability Pathway is also used as the main framework for the Company's Sustainability Report. Furthermore, to be able to analyze, monitor and evaluate sustainability performance periodically, all MIND ID members use SuperApps - Sustainability. Collection, analysis, review and reporting of sustainability performance data is updated regularly by the Company. Sustainability performance data is organized into 3 levels, namely unit level, corporate level and MIND ID level.*

*Regular management of sustainability performance data through SuperApps - Sustainability and Sustainability Reports, containing the sustainability pillars and ESG areas, as follows :*

a) **Pilar Lingkungan dan Perubahan Iklim** (*Environment and Climate Change*)

Data yang dibutuhkan dan/atau kinerja yang dilaporkan dalam pilar ini meliputi / *The data required and/or performance reported in this pillar includes:* :

Kode	Area	Data yang Dibutuhkan ( <i>Required Data</i> )
EN1	<b>Keanekaragaman Hayati dan Konservasi</b> <i>Biodiversity and Conservation</i>	<b>Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung</b> <i>Operation locations that are owned, leased, managed, or close to protected areas and areas with high biodiversity value outside protected areas</i>
		<b>Penggunaan lahan</b> <i>Land use</i>
		<b>Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati</b> <i>The significant impact of activities, products and services on biodiversity</i>
		<b>Habitat yang dilindungi atau dilestarikan</b> <i>Protected or conserved habitat</i>
		<b>Spesies daftar merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi</b> <i>IUCN red list species and national conservation list species with habitats within areas affected by operations</i>
EN2	<b>Air dan Udara</b> <i>Water and Air</i>	<b>Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama</b> <i>Interaction with water as a shared resource</i>
		<b>Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air</b> <i>Management of impacts related to water discharge</i>
		<b>Pengambilan air</b> <i>Water collection</i>
		<b>Konsumsi air</b> <i>Water consumption</i>
		<b>Emisi zat perusak ozon (ODS)</b> <i>Emissions of ozone depleting substances (ODS)</i>
		<b>Nitrogen Oksida (NOX), Sulfur Oksida (SOX), dan Emisi Udara Signifikan lainnya</b> <i>Nitrogen Oxides (NOX), Sulfur Oxides (SOX), and other Significant Air Emissions</i>
		<b>Zat-zat prioritas yang patut diperhatikan pembuangannya</b> <i>Priority substances that require careful disposal</i>



Kode	Area	Data yang Dibutuhkan ( <i>Required Data</i> )
EN3	<b>Dekarbonisasi</b> <i>Decarbonization</i>	<b>Konsumsi energi dalam organisasi</b> <i>Energy consumption in organizations</i>
		<b>Konsumsi energi di luar organisasi</b> <i>Energy consumption outside the organization</i>
		<b>Intensitas energi</b> <i>Energy intensity</i>
		<b>Pengurangan konsumsi energi</b> <i>Reduction of energy consumption</i>
		<b>Emisi GRK langsung (Cakupan 1)</b> <i>Direct GHG emissions (Scope 1)</i>
		<b>Emisi GRK tidak langsung (Cakupan 2)</b> <i>Indirect GHG emissions (Scope 2)</i>
		<b>Emisi GRK tidak langsung lainnya (Cakupan 3)</b> <i>Other indirect GHG emissions (Scope 3)</i>
		<b>Intensitas emisi GRK</b> <i>GHG emission intensity</i>
		<b>Pengurangan emisi GRK</b> <i>Reduction of GHG emissions</i>
EN4	<b>Produksi yang Bertanggungjawab</b> <i>Responsible production</i>	<b>Timbulan limbah dan dampak-dampak yang signifikan terkait limbah</b> <i>Waste generation and significant impacts related to waste</i>
		<b>Pengelolaan dampak yang signifikan terkait limbah</b> <i>Management of significant impacts related to waste</i>
		<b>Timbulan limbah</b> <i>Waste generation</i>
		<b>Limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir</b> <i>Waste diverted from final disposal</i>
		<b>Limbah yang dikirim ke pembuangan akhir</b> <i>Waste sent to final disposal</i>
		<b>Biaya lingkungan</b> <i>Environmental cost</i>

**b) Pilar Operasi yang Unggul dan Tata Layanan Produk** (*Smart Operation and Product Stewardship*)

Data yang dibutuhkan dan/atau kinerja yang dilaporkan dalam pilar ini meliputi / *The data required and/or performance reported in this pillar includes:* :

Kode	Area	Data yang Dibutuhkan ( <i>Required Data</i> )
SP1	<b>Operasi yang Unggul</b> <i>Operational Excellence</i>	<b>Program-program yang telah dilaksanakan oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan meningkatkan produktivitas dalam operasional</b> <i>Programs that have been implemented by the company to increase cost efficiency and increase productivity in operations</i>
		<b>Sertifikasi</b> <i>Certification</i>
		<b>Penghargaan</b> <i>Awards</i>
SP2	<b>Automasi, Digitalisasi, dan Inovasi</b> <i>Automation, Digitalization and Innovation</i>	<b>Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan</b> <i>Substantiated complaints regarding violations of customer privacy and loss of customer data</i>
		<b>Realisasi proyek/inisiatif automasi dan digitalisasi</b> <i>Realization of automation and digitalization projects/initiatives</i>
		<b>Realisasi pada proyek terkait inovasi produk yang mendukung keberlanjutan</b> <i>Realization of projects related to product innovation that supports sustainability</i>
SP3	<b>Produk Berkualitas dan Bertanggungjawab</b> <i>Quality and Responsible Products</i>	<b>Komitmen Kebijakan</b> <i>Policy commitment</i>
		<b>Memahami komitmen kebijakan</b> <i>Understand policy commitments</i>
		<b>Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan</b> <i>Compliance with laws and regulations</i>
		<b>Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa</b> <i>Assessment of the health and safety impacts of various product and service categories</i>
		<b>Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa</b> <i>Incidents of non-compliance relating to the health and safety impacts of products and services</i>

Kode	Area	Data yang Dibutuhkan ( <i>Required Data</i> )
SP4	<b>Pemasaran dan Penjualan</b> <i>Marketing and Sales</i>	<b>Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa</b> <i>Requirements for product and service labeling and information</i>
		<b>Insiden ketidakpatuhan terkait pelabelan dan informasi produk dan jasa</b> <i>Incidents of non-compliance related to product and service labeling and information</i>
		<b>Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran</b> <i>Incidents of non-compliance related to marketing communications</i>
SP5	<b>Kepuasan Pelanggan</b> <i>Customer Satisfaction</i>	<b>Jumlah produk yang ditarik kembali</b> <i>Number of products recalled</i>
		<b>Survei kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan</b> <i>Customer satisfaction surveys for sustainable financial products and/or services</i>
		<b>Sertifikasi terkait kualitas produk</b> <i>Certification related to product quality</i>
SP6	<b>Manajemen Pasokan dan Kontraktor</b> <i>Supply and Contractor Management</i>	<b>Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan</b> <i>Selection of new suppliers using environmental criteria</i>
		<b>Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil</b> <i>Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken</i>
		<b>Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial</b> <i>Selection of new suppliers using social criteria</i>
		<b>Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil</b> <i>Negative social impacts in the supply chain and actions taken</i>



c) **Pilar Sumber Daya Manusia (People)**

Data yang dibutuhkan dan/atau kinerja yang dilaporkan dalam pilar ini meliputi / *The data required and/or performance reported in this pillar includes :*

Kode	Area	Data yang Dibutuhkan ( <i>Required Data</i> )
PE1	<b>Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3)</b> <i>Safety and Occupational Health (K3)</i>	<b>Sistem manajemen Kesehatan dan keselamatan kerja</b> <i>Occupational health and safety management system</i>
		<b>Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden</b> <i>Hazard identification, risk assessment, and incident investigation</i>
		<b>Layanan kesehatan kerja</b> <i>Occupational health services</i>
		<b>Partisipasi, konsultan, dan komunikasi pekerja pada kesehatan dan keselamatan kerja</b> <i>Worker participation, consultation and communication on occupational health and safety</i>
		<b>Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja</b> <i>Training for workers regarding occupational safety and health</i>
		<b>Peningkatan kualitas kesehatan pekerja</b> <i>Improving the quality of workers' health</i>
		<b>Pencegahan dan mitigasi kesehatan dan keselamatan kerja yang berdampak langsung dalam hubungan bisnis</b> <i>Prevention and mitigation of occupational health and safety which have a direct impact on business relationships</i>
		<b>Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen</b> <i>Workers covered by the management system</i>
		<b>Kecelakaan pekerja</b> <i>Worker accidents</i>
	<b>Penyakit akibat kerja</b> <i>Occupational illness</i>	
PE2	<b>Keamanan</b> <i>Security</i>	<b>Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur pengelolaan hak asasi manusia</b> <i>Security officers trained in human rights management policies or procedures</i>
		<b>Strategi pengamanan dan kinerja pengamanan terkait OBVITNAS</b> <i>Security strategy and security performance related to vital national objects</i>
PE3	<b>Rekrutmen</b> <i>Recruitment</i>	<b>Perekrutan karyawan dan penggantian karyawan</b> <i>Employee recruitment and employee replacement</i>

Kode	Area	Data yang Dibutuhkan ( <i>Required Data</i> )
PE4	<b>Inklusi dan Keberagaman</b> <i>Inclusion and Diversity</i>	<b>Informasi karyawan</b> <i>Employee information</i>
		<b>Informasi pekerja yang bukan karyawan</b> <i>Information on workers who are not employees</i>
		<b>Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional</b> <i>Ratio of standard entry-level employee wages by gender to regional minimum wages</i>
		<b>Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal</b> <i>The proportion of senior management who comes from the local community</i>
		<b>Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional</b> <i>Minimum notice period regarding operational changes</i>
		<b>Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan</b> <i>Diversity of governance bodies and employees</i>
		<b>Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki</b> <i>Ratio of basic salary and remuneration for women compared to men</i>
		<b>Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan</b> <i>Incidents of discrimination and corrective actions taken</i>
PE5	<b>Pelatihan dan Pengembangan</b> <i>Training and Development</i>	<b>Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan</b> <i>Average training hours per year per employee</i>
		<b>Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan</b> <i>Programs to improve employee skills and transition assistance programs</i>
		<b>Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir</b> <i>Percentage of employees who receive regular performance and career development reviews</i>

Kode	Area	Data yang Dibutuhkan ( <i>Required Data</i> )
PE6	<b>Hak-hak Perkerja</b> <i>Employee Rights</i>	<b>Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau parah waktu</b> <i>Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or hard-time employees</i>
		<b>Cuti melahirkan</b> <i>Maternity leave</i>
		<b>Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko</b> <i>Operations and suppliers where the right to freedom of association and collective bargaining may be at risk</i>
		<b>Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak</b> <i>Operations and suppliers at significant risk of child labor incidents</i>
		<b>Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja kerja paksa atau wajib kerja</b> <i>Operations and suppliers that are at significant risk of incidents of forced or compulsory labor</i>

**d) Pilar Masyarakat (Society)**

Data yang dibutuhkan dan/atau kinerja yang dilaporkan dalam pilar ini meliputi / *The data required and/or performance reported in this pillar includes: :*

Kode	Area	Data yang Dibutuhkan (Required Data)
SO1	<b>Investasi Sosial</b> <i>Social Investment</i>	<b>Investasi Infrastruktur</b> <i>Infrastructure investment</i>
		<b>Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan</b> <i>Significant indirect economic impact</i>
		<b>Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak dan program pengembangan</b> <i>Operations with local community involvement, impact assessment and development programs</i>
		<b>Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal</b> <i>Actual and potential operations have a significant negative impact on local communities</i>
SO2	<b>Hak Asasi Manusia</b> <i>Employee Rights</i>	<b>Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat</b> <i>Incidents of violations involving the rights of indigenous peoples</i>
		<b>Tata kelola penanganan keluhan masyarakat</b> <i>Governance for handling public complaints</i>
		<b>Permasalahan penggunaan lahan</b> <i>Land use problems</i>
SO3	<b>Hubungan dengan Pemangku Kepentingan</b> <i>Relationship with Stakeholders</i>	<b>Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan</b> <i>Approaches to stakeholder engagement</i>



e) **Pilar Pengembangan Ekonomi (Economic)**

Data yang dibutuhkan dan/atau kinerja yang dilaporkan dalam pilar ini meliputi / *The data required and/or performance reported in this pillar includes :*

Kode	Area	Data yang Dibutuhkan (Required Data)
EC1	<b>Dampak Ekonomi</b> <i>Economic Impacts</i>	<b>Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan</b> <i>Generated and distributed direct economic value</i>
		<b>Investasi infrastruktur dan dukungan layanan</b> <i>Infrastructure investment and service support</i>
		<b>Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan</b> <i>Significant indirect economic impact</i>
		<b>Pendekatan terhadap pajak</b> <i>Approach to taxes</i>
		<b>Tata kelola, pengendalian, dan manajemen risiko pajak</b> <i>Governance, control and tax risk management</i>
		<b>Keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan perhatian yang berkaitan dengan pajak</b> <i>Stakeholder engagement and management of tax-related concerns</i>
		<b>Laporan per negara</b> <i>Reports per country</i>
EC2	<b>Pengembangan Lokal dan Creating Shared Value</b> <i>Relationship with Stakeholders</i>	<b>Kegiatan, rantai pasokan, dan hubungan bisnis lainnya</b> <i>Activities, supply chains and other business relationships</i>
		<b>Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal</b> <i>Proportion of spending on local suppliers</i>
EC3	<b>Kinerja Keuangan</b> <i>Financial performance</i>	<b>Laporan keuangan</b> <i>Financial statements</i>
		<b>Investasi terkait pengembangan usaha dan diversifikasi</b> <i>Investments related to business development and diversification</i>
		<b>Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya</b> <i>Obligations of defined benefit pension plans and other pension plans</i>
EC4	<b>Ekspansi Bisnis dan Diversifikasi</b> <i>Business Expansion and Diversification</i>	<b>Cadangan dan sumber daya</b> <i>Reserves and resources</i>
		<b>Proyek hilirisasi</b> <i>Downstream project</i>

**f) Pilar Tata Kelola (Governance)**

Data yang dibutuhkan dan/atau kinerja yang dilaporkan dalam pilar ini meliputi / *The data required and/or performance reported in this pillar includes :*

Kode	Area	Data yang Dibutuhkan (Required Data)
GO1	<b>Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan</b> <i>Leadership and Decision Making</i>	<b>Struktur dan komposisi tata kelola</b> <i>Governance structure and composition</i>
		<b>Nominasi dan pemilihan badan tata kelola tertinggi</b> <i>Nomination and election of the highest governance institution</i>
		<b>Ketua badan tata kelola tertinggi</b> <i>Chair of the highest governance institution</i>
		<b>Peran badan tata kelola tertinggi</b> <i>The role of the highest governance institution</i>
		<b>Pendelegasian tanggungjawab untuk mengelola tata dampak</b> <i>Delegation of responsibility for managing impact words</i>
		<b>Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi</b> <i>The collective knowledge of the highest governance institution</i>
		<b>Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi</b> <i>Evaluation of the performance of the highest governance institution</i>
GO2	<b>Transparansi dan Akuntabilitas</b> <i>Transparency and Accountability</i>	<b>Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan berkelanjutan</b> <i>The role of the highest governance institution in sustainability reporting</i>
		<b>Komunikasi tentang masalah-masalah kritis</b> <i>Communication about critical issues</i>
		<b>Kebijakan remunerasi</b> <i>Remuneration policy</i>
		<b>Proses untuk menentukan remunerasi</b> <i>Process for determining remuneration</i>
		<b>Rasio kompensasi total tahunan</b> <i>Annual total compensation ratio</i>
		<b>Mekanisme untuk meminta saran dan menyampaikan kekhawatiran</b> <i>Mechanisms for seeking advice and raising concerns</i>

Kode	Area	Data yang Dibutuhkan ( <i>Required Data</i> )
GO3	Etika Bisnis & Kepatuhan <i>Business Ethics &amp; Compliance</i>	<b>Konflik kepentingan</b> <i>Conflict of interest</i>
		<b>Komitmen kebijakan</b> <i>Policy commitment</i>
		<b>Menanamkan komitmen kebijakan</b> <i>Instill policy commitment</i>
		<b>Proses untuk memulihkan dampak negatif</b> <i>Process for reversing negative impacts</i>
		<b>Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan</b> <i>Compliance with laws and regulations</i>
		<b>Keanggotaan asosiasi</b> <i>Association membership</i>
		<b>Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi</b> <i>Operations assessed as having corruption-related risks</i>
		<b>Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi</b> <i>Communication and training on anti-corruption policies and procedures</i>
		<b>Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil</b> <i>Proven incidents of corruption and actions taken</i>
<b>Kontribusi politik</b> <i>Political contributions</i>		
GO4	Manajemen Risiko <i>Risk management</i>	<b>Asesmen materialitas ESG</b> <i>ESG materiality assessment</i>
		<b>Area ESG material</b> <i>Material ESG area</i>
		<b>Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim</b> <i>Financial implications and other risks and opportunities resulting from climate change</i>

**17 PENILAIAN EFEKTIVITAS ESG**

Penilaian efektifitas implementasi ESG penting untuk dilakukannya sebagai bagian dari kegiatan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Evaluasi ini membantu perusahaan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip ESG yang telah terintegrasi dalam operasi bisnis dan pengambilan keputusan. Evaluasi efektifitas implementasi ESG melibatkan pemantauan dan analisis gap secara berkala untuk sebagai upaya perbaikan berkelanjutan.

Rating ESG adalah suatu proses penilaian yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu perusahaan atau entitas bisnis telah mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam operasinya. Perusahaan dapat mengikuti rating ESG sebagai bagian dari penilaian atau pengukuran atas efektifitas implementasi ESG. Keterlibatan perusahaan dalam rating ESG merupakan upaya untuk pengukuran kinerja berkelanjutan, mitigasi risiko, meningkatkan akses permodalan, meningkatkan kepatuhan, serta meningkatkan keunggulan kompetitif. Dalam hal kebutuhan untuk optimalisasi penerapan ESG, perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang ditunjuk untuk memberikan layanan jasa konsultasi dan pendampingan ESG. Perusahaan melakukan penilaian efektifitas implementasi ESG dengan melakukan penilaian ESG rating melalui beberapa lembaga diantaranya Sustainalytics, CDP, dan MSCI.

**17 ESG EFFECTIVENESS ASSESSMENT**

*It is important to assess the effectiveness of ESG implementation as part of continuous evaluation and improvement activities.*

*This evaluation helps company, investors and other stakeholders to understand the extent to which ESG principles have been integrated into business operations and decision making. Assessment and evaluation of the effectiveness of ESG implementation involve regular monitoring and gap analysis as a means of continuous improvement.*

*ESG Rating is an assessment process that can be used to evaluate the extent to which a company or business entity has integrated sustainability principles in its operations. Company can follow ESG rating as part of assessing or measuring the effectiveness of ESG implementation. Company involvement in ESG rating is an effort to measure sustainable performance, mitigate risk, increase access to capital, improve compliance, and increase competitive advantage. In the case of the need to optimize ESG implementation, company can collaborate with the appointed third parties to provide ESG consultancy and assistance services. The company assesses the effectiveness of ESG implementation conducting ESG rating assessments through several institutions including Sustainalytics, CDP, and MSCI.*

